



# RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN BAPPELITBANGDA TAHUN 2018-2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA BEKASI  
2021**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>11</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda .....	11
2.2. Sumber Daya Bappelitbangda .....	23
2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda .....	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda .....	47
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	<b>51</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda .....	51
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	54
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	61
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	71
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	77
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>80</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda .....	80
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>88</b>
5.1. Strategi Bappelitbangda Kota Bekasi .....	88
5.2. Arah Kebijakan Bappelitbangda .....	94
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>98</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>137</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>140</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi .....	24
Tabel 2.2.	Peralatan/Kendaraan pada Bappelitbangda Kota Bekasi ....	25
Tabel 2.3.	Peralatan Kantor pada Bappelitbangda Kota Bekasi .....	26
Tabel 2.4.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2013–2018 (Perubahan III) .....	28
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Sasaran Pelayanan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2013–2018 (Renstra Perubahan III) .....	29
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2014-2018 .....	33
Tabel 2.7.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kota Bekasi Dalam Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 (murni).....	37
Tabel 2.8.	Pencapaian Kinerja Sasaran Bappelitbangda Kota Bekasi sampai dengan Tahun 2021 ....	39
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2019 - 2021 ...	45
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	51
Tabel 3.2.	Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bappelitbangda Kota Bekasi dalam Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Terpilih Periode Tahun 2018-2023 .....	57
Tabel 3.3.	Faktor Penghambat Pencapaian Misi Pembangunan Kota Bekasi .....	60
Tabel 3.4.	Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bappelitbangda Kota Bekasi Dintinjau dari Sasaran Renstra Kementerian PPN/ Bappenas .....	65
Tabel 3.5.	Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bappelitbangda Kota Bekasi Dintinjau dari Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat dan BP2D Provinsi Jawa Barat	69
Tabel 3.6.	Isu Strategis Kota Bekasi berdasarkan capaian SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Program Prioritas	74
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2019-2023 .....	82
Tabel 4.2.	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kota Bekasi .....	84
Tabel 5.1.	Penilaian Analisa SWOT Bappelitbangda Kota Bekasi .....	90
Tabel 5.2.	Formulasi Strategi SWOT .....	92
Tabel 5.3.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda .....	95
Tabel 5.4.	Fokus Prioritas Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2019-2023 .....	97
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 .....	104
Tabel 6.2.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2019-2023 (nomenklatur baru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020)	119
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Bappelitbangda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 .....	138

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD	4
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Bekasi (16 Februari 2021) .....	17
Gambar 2.2.	Data Pendidikan Pegawai Bappelitbangda Kota Bekasi .....	24
Gambar 2.3.	Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kota Bekasi .....	25
Gambar 5.1.	Tahapan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2019-2023 ....	96
Gambar 6.1.	Pohon Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi .....	98

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan tanggal 21 Februari 2019, mengamanatkan bahwa salah satu Perangkat Daerah berbentuk Badan Tipe A adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi pada tanggal 22 Februari 2019. Namun demikian pengukuhan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bappelitbangda sebagai Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan atau Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 mengikuti periode RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7 Ayat (1) bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang telah disusun tersebut merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 tersebut merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Bappelitbangda Kota Bekasi serta menyajikan agenda utama

Bappelitbangda Kota Bekasi untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2013-2018 yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini.

Pada tahun 2021, Renstra Bappelitbangda 2018-2023 dilakukan perubahan menyesuaikan atau mempedomani perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023, yang dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut.

Selain itu, dalam penyusunan Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 untuk urusan perencanaan dalam prosesnya menelaah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2020-2024 (Permen PPN/Perka Bappenas Nomor 11 Tahun 2020) yang memiliki tugas utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Di samping itu, menelaah juga Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat terkait isu strategis bidang perencanaan pembangunan daerah, serta memperhatikan Renstra Bappeda wilayah kab/kota sekitar Kota Bekasi, seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Sedangkan untuk urusan penelitian dan pengembangan, dalam prosesnya menelaah Renstra Kementerian Dalam Negeri (khususnya Renstra Badan Litbang), Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat, Renstra Kabupaten Bekasi, Renstra Kota Jakarta Timur, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan formal suatu instansi pemerintah, Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi 2018-2023 disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis, yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dilakukan dengan menelaah Renstra yang sebelumnya telah disusun, memilah hal-hal yang masih relevan, mengganti atau mengubah yang sudah tidak relevan, serta menambah hal-hal yang penting dimasukkan, serta mengurangi hal-hal yang tidak perlu atau sudah tidak relevan.

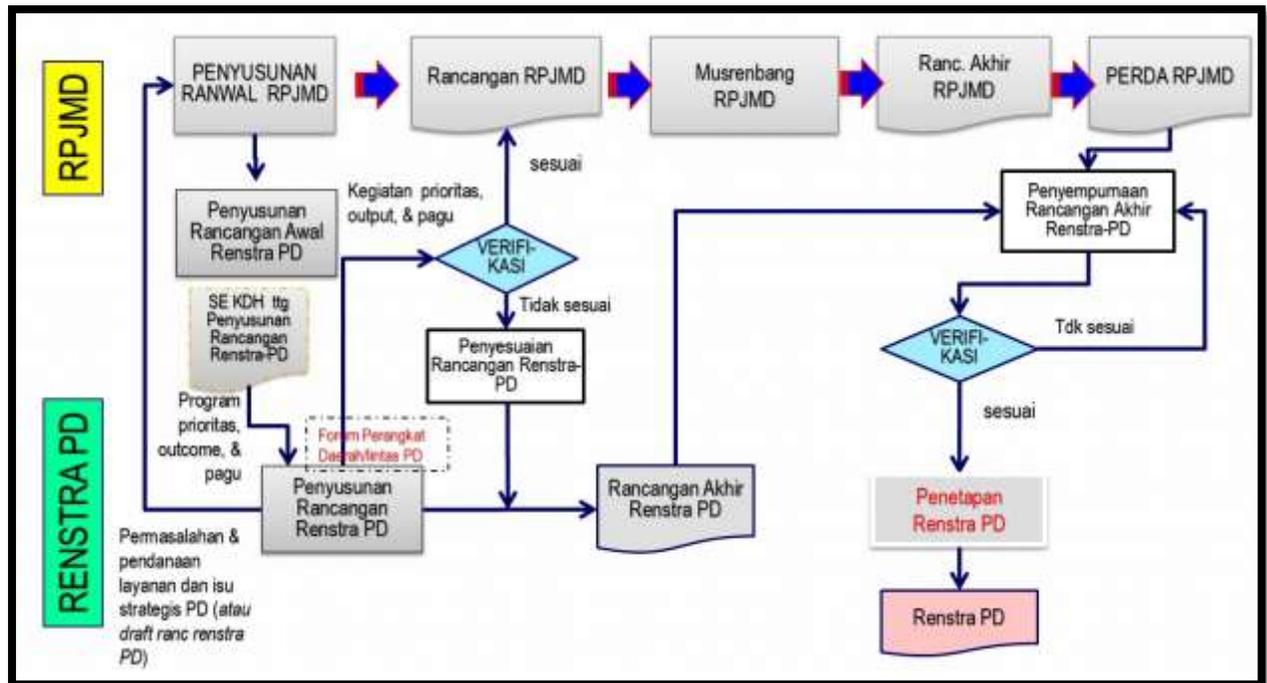
Penyusunan Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi 2018-2023 dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018-2023. Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi 2018-2023 juga menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi 2018-2023 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra sebelumnya, serta menindaklanjuti pencapaian produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian strategis pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan Sumber Daya Aparatur, serta penyempurnaan manajemen selama periode 2008-2013 yang merupakan modal bagi perencanaan program pembangunan daerah 2018-2023.

Penyusunan Renstra Perubahan ini telah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir

Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Perubahan sama atau mutatis mutandi dengan penyusunan Renstra sebelumnya, mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

**Gambar 1.1.**  
**Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD**  
 (Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 juga disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan terhadap RTRW dan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

RTRW merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Bappelitbangda sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang

Daerah (TKPRD), melakukan kegiatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait (anggota TKPRD) dalam penyusunan program dan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Selain itu, Bappelitbangda juga berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-program perwujudan rencana, baik perwujudan rencana struktur (jaringan transportasi, sumber daya air, dan lain-lain), perwujudan rencana pola ruang (kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawasan strategis.

Di samping itu, KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 telah dilakukan, sehingga KLHS RPJMD Kota Bekasi Perubahan Tahun 2018-2023 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
13. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi;
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi; dan
32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah menindaklanjuti:

- a. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- b. terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut; serta
- c. penyelarasan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

#### **1.3.2. Tujuan**

Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan:

- a. merumuskan perubahan target sasaran pembangunan urusan perencanaan dan penelitian pengembangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda dan regulasi terkini dalam perencanaan pembangunan, sehingga terjaminnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, memanfaatkan hasil kelitbang, serta terwujudnya sistem inovasi daerah;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan penelitian pengembangan daerah dalam rangka menunjang pencapaian perubahan target sasaran pembangunan, yang pada gilirannya mewujudkan visi dan misi daerah;

- c. memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
- d. menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Bappelitbangda Kota Bekasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
- e. menjadi pedoman bagi seluruh aparaturnya Bappelitbangda dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I      Pendahuluan**

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan perubahan Renstra, serta Sistematika Penulisan.

##### **Bab II      Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbangda, Sumber Daya Bappelitbangda yang dimiliki Bappelitbangda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda yang dimiliki Bappelitbangda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda.

##### **Bab III     Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Bappelitbangda beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Bappelitbangda yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong dari pelayanan Bappelitbangda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappelitbangda ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, RTRW, dan KLHS.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda dalam lima tahun mendatang.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappelitbangda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappelitbangda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD perubahan.

**Bab VIII Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah**

Bappelitbangda dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Adapun tugas pokok Bappelitbangda sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, adalah merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang analisis pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, bidang pembangunan manusia dan masyarakat, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta bidang penelitian dan pengembangan untuk mencapai visi dan misi Badan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Bappelitbangda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. penyusunan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara holistik-tematik, integratif dan spasial;
- d. penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD);
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang;
- f. pengoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

- g. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;
- h. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan peraturan, pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- j. penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- k. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan peraturan, pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- m. penyiapan bahan, fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- n. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- o. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- p. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- q. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- r. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- s. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- t. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- u. pembinaan administrasi perkantoran;
- v. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Kepegawaian Daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- w. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
- x. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- y. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- z. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- aa. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris, lima Bidang, dan Fungsional yaitu:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan

penyusunan rencana pembangunan daerah, melaksanakan evaluasi, pengendalian atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang meliputi Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan program Pembangunan Daerah serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

1. Sub Bidang Analisis Pembangunan Daerah;
2. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, dan kepegawaian, penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik), fungsi kewilayahan (kecamatan), serta fungsi pembinaan dan pengawasan, untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat terdiri dari:

1. Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Sub Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan dan Kepegawaian;
3. Sub Bidang Pemerintahan.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, fungsi penunjang urusan

keuangan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pertanian, Perikanan dan Pangan, untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari:

1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Pariwisata dan Kebudayaan;
2. Sub Bidang Penanaman Modal dan Keuangan;
3. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pertanian, Perikanan dan Pangan.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan bencana, komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari:

1. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
3. Sub Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi urusan sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

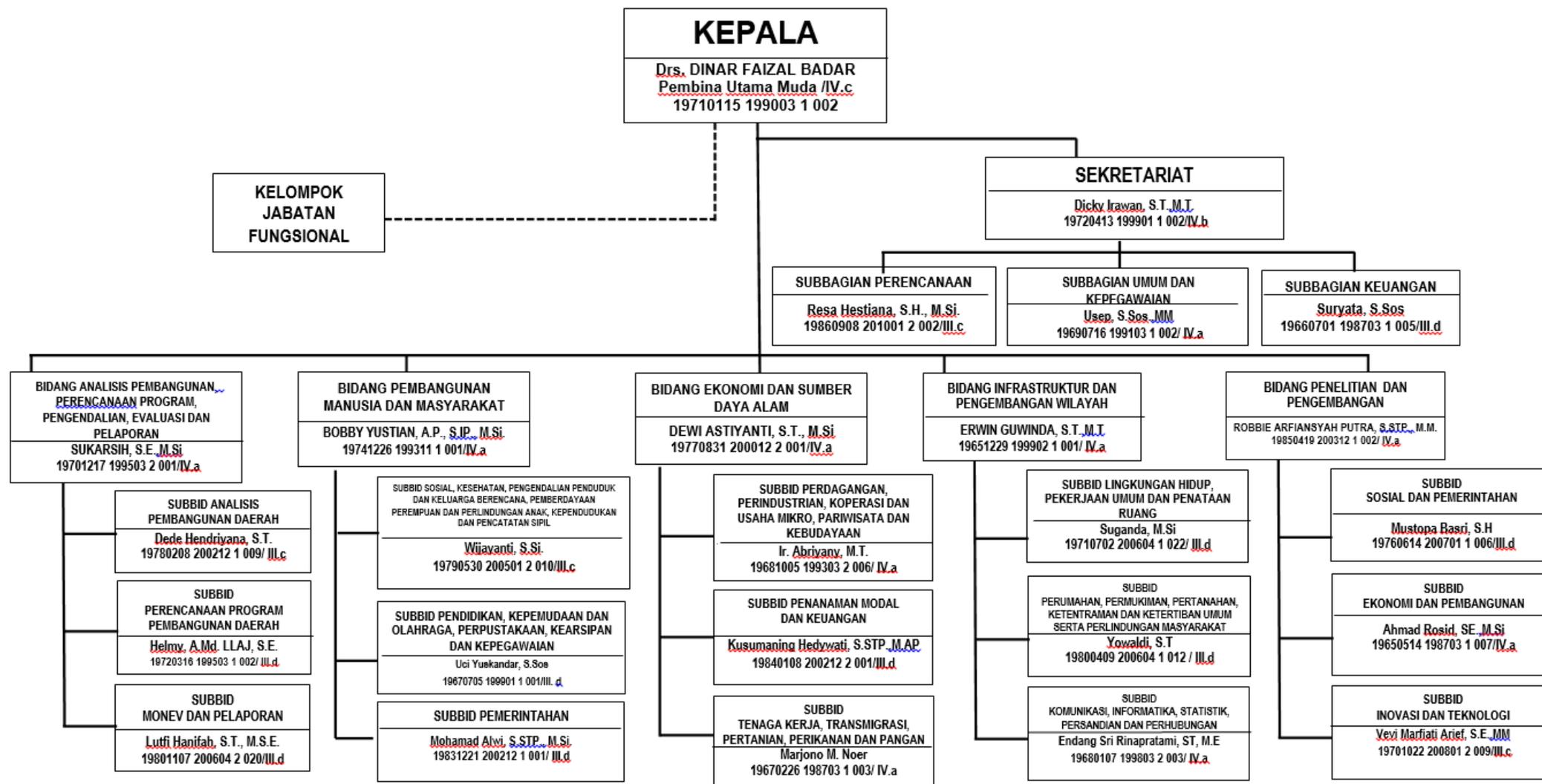
Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Susunan Organisasi Bappelitbangda terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Analisis Pembangunan Daerah;
  - b. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
  - c. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Sub Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bidang Pemerintahan.
5. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Pariwisata dan Kebudayaan;
  - b. Sub Bidang Penanaman Modal dan Keuangan;
  - c. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pertanian, Perikanan dan Pangan.
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
  - c. Sub Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Bekasi**  
**(16 Februari 2021)**



Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi merupakan penjabaran dari beban pekerjaan dan tugas-tugas yang diamanatkan oleh perundang-undangan yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan daerah, yaitu:

### **1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)**

Dalam Undang-undang ini diatur beberapa tugas Bappelitbangda, yaitu:

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan RKPD;
- c. Menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya (pasal 28)
- d. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (pasal 29)

### **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam Undang-Undang ini diantaranya mengatur:

- a. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (Pasal 260 ayat 1)
- b. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah (Pasal 260 ayat 2).
- c. Pasal-pasal lain yang secara eksplisit mengatur perencanaan pembangunan daerah antara lain pada pasal 262, pasal 263 dan pasal 274.

### **3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tugas Bappelitbangda adalah mensinkronkan perencanaan spasial dengan sektoral, termasuk dalam melakukan pelayanan perijinan.

### **4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**

Dalam Pasal 46 ayat 5, disebutkan bahwa unsur penunjang urusan pemerintahan terdapat perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

### **5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.**

Regulasi ini mengatur secara rinci terkait tata cara pengelolaan berbagai kegiatan kelitbangan, menyangkut antara lain: bentuk-bentuk kegiatan, pelaku, tahapan, jangka waktu pelaksanaan, sampai pada pemanfaatan dan publikasi hasil-hasil kelitbangan.

Selain tugas-tugas yang tercantum di atas, Bappelitbangda juga melakukan tugas koordinasi yang meliputi:

- a. Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- b. Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang meliputi unsur pimpinan DPRD, semua fraksi, semua komisi, panitia musyawarah, panitia khusus;
- c. Koordinasi dengan semua tingkatan pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementrian/Lembaga);
- d. Koordinasi dengan semua pengelola sumber dana (APBN/loan/hibah, dana masyarakat/dunia usaha dalam skema kemitraan/*partnership*);

- e. Koordinasi dengan semua Perangkat Daerah;
- f. Koordinasi kerjasama antar daerah dalam lingkup regional, dan nasional;
- g. Koordinasi membangun perencanaan partisipatif dengan masyarakat/dunia usaha; dan
- h. Koordinasi membangun kemitraan untuk efektivitas pembiayaan pembangunan dengan pihak swasta.

**6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;**

Regulasi ini mengatur secara rinci terkait tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah termasuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

**7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);**

Permendagri ini mengatur tentang informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Permendagri ini untuk memenuhi kewajiban Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;**

Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Dalam menjalankan tugas seperti yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, Bappelitbangda Kota Bekasi sebagai lembaga yang strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Kebijakan pembangunan yang dirumuskan dan produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappelitbangda menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan oleh Bappelitbangda Kota Bekasi merupakan hasil proses perencanaan melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif dan *Top Down Bottom up*.

- **Proses Politik**, dalam sistem perencanaan ini terkait dengan penjabaran agenda pembangunan daerah baik Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) dan tahunan (RKP). Pada proses ini, DPRD dilibatkan dalam menyusun agenda pembangunan Kota Bekasi.
- **Proses Teknokratik**, yaitu proses perencanaan yang dilaksanakan melalui penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Pada proses ini, Bappelitbangda yang secara fungsional bertugas menyusun perencanaan pembangunan daerah melibatkan pakar-pakar atau tenaga ahli baik dari perguruan tinggi maupun dari profesi lainnya.
- **Proses Partisipatif**, yaitu suatu proses perencanaan berbasis partisipasi masyarakat. Proses ini diwujudkan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan kota, yang melibatkan masyarakat dan seluruh pihak berkepentingan (*stakeholder*) untuk memberikan masukan-masukan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan yang menjadi aspirasi masyarakat sekaligus menjadi sarana komunikasi antar berbagai pelaku pembangunan (pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat) dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan daerah.
- **Proses Top Down Bottom Up**, yaitu suatu proses perencanaan dengan memperhatikan perencanaan pada tingkat Pemerintahan. Proses ini dilakukan untuk menyelaraskan program-program agar dapat menjamin sinergitas dari semua kegiatan pemerintah dan masyarakat pembangunan antar daerah dan antar tingkat Pemerintahan. Penyelarasan rencana-rencana lembaga pemerintah dilaksanakan melalui forum-forum dan musyawarah perencanaan yang dilaksanakan baik di tingkat Kota, Provinsi maupun Tingkat Pusat.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Bappelitbangda memiliki 66 (enam puluh enam) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappelitbangda Nomor: 067.2/129-SK/Bappelitbangda.Set tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi. Beberapa SOP diantaranya sebagai berikut:

1. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
3. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
4. SOP Penyusunan Perencanaan Penggaran Kegiatan
5. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Mikro, Pariwisata Dan Kebudayaan
6. SOP Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Mikro, Pariwisata Dan Kebudayaan
7. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Urusan Penanaman Modal Dan Keuangan
8. SOP Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Urusan Penanaman Modal Dan Keuangan
9. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian Dan Pangan
10. SOP Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian Dan Pangan
11. SOP Penyusunan Kajian
12. SOP Fasilitasi Penerbitan Izin Penelitian Bagi Warga Negara Asing
13. SOP Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan
14. SOP Pelaksanaan Penelitian Mandiri
15. SOP Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Bekasi
16. SOP Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi
17. SOP Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kota Bekasi
18. SOP Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Bekasi
19. SOP Monitoring Dan Evaluasi Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah
20. SOP Pengendalian Dan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah
21. SOP Pengendalian Dan Evaluasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

22. SOP Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat
23. SOP Penyusunan Pedoman Kerja Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat
24. SOP Penyusunan Rencana Kerja Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat
25. SOP Penyusunan Evaluasi Pembangunan Lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat
26. SOP Penyusunan Draft Pertimbangan Teknis Dan / Atau Administrasi Terkait Kebijakan-Kebijakan Strategis
27. SOP Penyusunan Dokumen Laporan Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat
28. SOP Dalev Penyusunan RPJPD
29. SOP Dalev Penyusunan RPJMD
30. SOP Pengendalian Dan Evaluasi Penyusunan RKPD
31. SOP Dalev Penyusunan Renstra
32. SOP Dalev Penyusunan Renja
33. SOP Dalev Pelaksanaan RPJPD
34. SOP Dalev Pelaksananan RPJMD
35. SOP Dalev Pelaksanaan RKPD
36. SOP Evaluasi Hasil RPJPD
37. SOP Evaluasi Hasil RPJMD
38. SOP Evaluasi Hasil RKPD
39. SOP Dalev Pelaporan
40. SOP Bantuan Keuangan
41. SOP Penyusunan RKPD
42. SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Capaian Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Bappelitbangda Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 113 orang aparatur yang terdiri dari 63 orang laki-laki dan 50 orang perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri dari 75 orang PNS dan 38 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK), sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1.**

**Jumlah Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi**

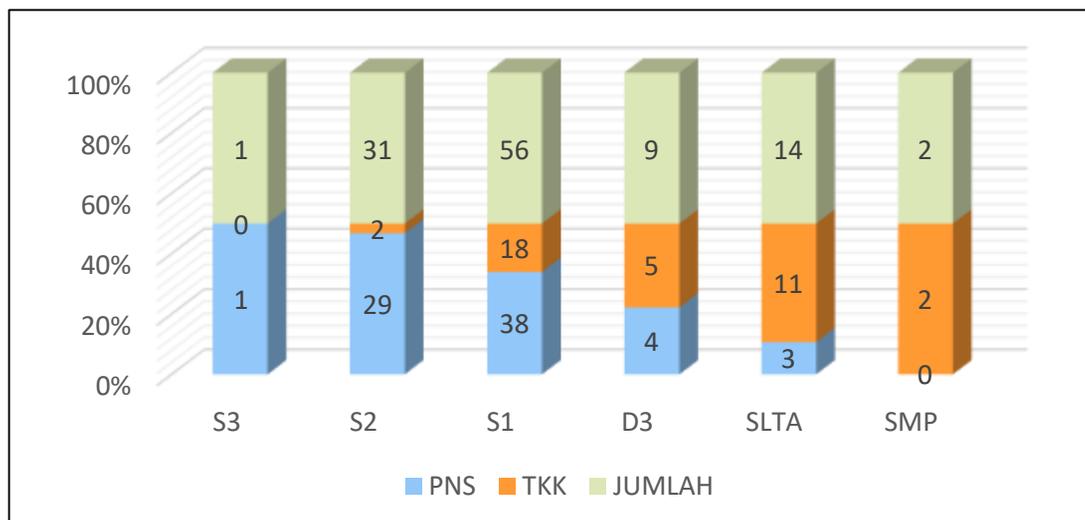
URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
GOL IV	13	8	5
GOL III	60	30	30
GOL II	2	2	0
Jumlah PNS	<b>75</b>	<b>40</b>	<b>35</b>
Jumlah TKK	38	23	15
Jumlah	<b>113</b>	<b>63</b>	<b>50</b>

Sumber: Subbagian Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2021.

Apabila dilihat berdasarkan Golongan Kepangkatan, paling banyak aparatur Bappelitbangda berada pada Golongan III sekitar 65 orang atau 81,25%, sisanya Golongan IV sekitar 13 orang atau 16,15% dan masih ada Golongan II sekitar 2 orang atau 2,5%.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar aparatur Bappelitbangda tingkat pendidikan terakhirnya adalah S1 sekitar 56 orang atau 49,55%, sisanya untuk S2 sekitar 31 orang atau 27,43%, dan S3 sebanyak 1 orang atau 0,88%, dan di bawah S1 sebanyak 25 orang atau 22,12%, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

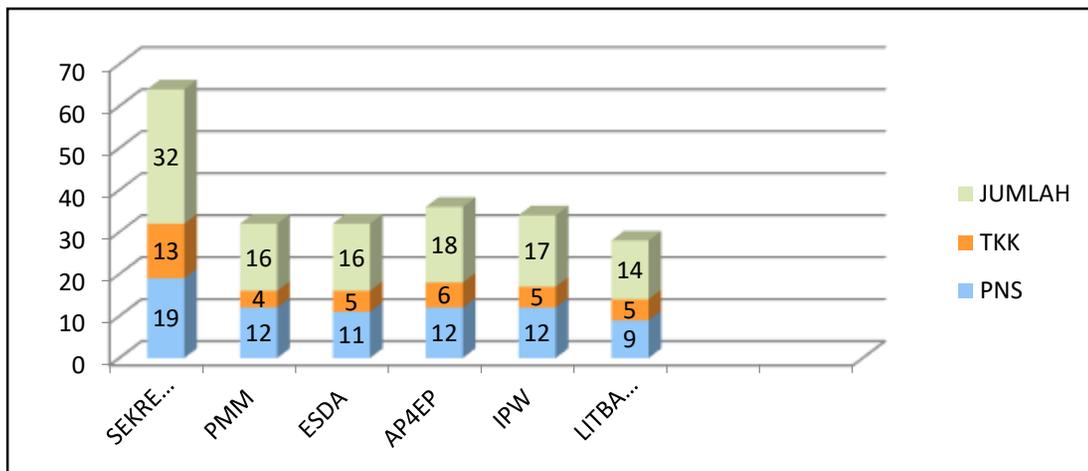
**Gambar 2.2.**  
**Data Pendidikan Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi**



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2021

Seluruh aparatur Bappelitbangda tersebar di unit/Bidang sebagai berikut:

**Gambar 2.3.**  
**Jumlah Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi**



*Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2021*

Secara kuantitas aparatur Bappelitbangda sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti sarjana informatika dan sarjana planologi,. Misalnya untuk pengembangan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan penganggaran sampai dengan monitoring dan evaluasi pembangunan, serta terkait pembangunan sistem penelitian dan pengembangan diperlukan SDM aparatur yang ahli seperti Fungsional Pranata Komputer dari Sarjana Informatika.

Apabila ditinjau dari sisi prasarana, sampai dengan tahun 2021, Bappelitbangda Kota Bekasi sudah memiliki gedung kantor sendiri yang memadai. Untuk mobilitas, Bappelitbangda Kota Bekasi memiliki 22 unit mobil, yaitu untuk Kepala Bappelitbangda, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubag/Kasubid. Sementara untuk kendaraan dinas berupa sepeda motor terdapat 22 unit motor. Ketersediaan kendaraan dinas untuk mendukung mobilitas sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas Bappelitbangda karena setiap Kepala Subbidang dituntut setiap saat ke lapangan, baik untuk berkoordinasi maupun untuk mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

**Tabel 2.2.****Kendaraan pada Bappelitbangda Kota Bekasi**

No	Kendaraan	Banyaknya	Jenis	Peruntukan	Kondisi
1	Mobil Operasional	1	SUV	Operasional Kaban	Baik
2	Mobil Operasional	1	MPP	Operasional Sekretaris	Baik
3	Mobil Operasional	5	SUV	Operasional Para Kabid	Baik
4	Mobil Operasional	14	Mini Bus/Van	Operasional Kasubag/Kasubid	Baik
5	Mobil Operasional	1	Pick Up	Kasubbid/Pelaksana	Baik
6	Sepeda Motor Operasional	22	Roda 2 (Matic /Manual)	Pelaksana/Kasubbid	Baik

Sumber: Subbagian Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2020.

Dalam menunjang pekerjaan aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi didukung oleh sarana prasarana kantor berjumlah 434 unit dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.3.****Peralatan Kantor pada Bappelitbangda Kota Bekasi**

NO	KEBUTUHAN PERALATAN KANTOR	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Alat Teleconference	13	Unit	Kondisi Baik
2	- Microfon wireless	61	set	Kondisi Baik
3	- Webcam 360°	61	set	Kondisi Baik
4	- Mixxer sound Kecil	61	set	Kondisi Baik
5	- tripod	70	set	Kondisi Baik
6	Air Conditioner	5	Unit	Kondisi Baik
7	Alat Perekam Suara / Voice Recorder Digital 8 GB	5	Unit	Kondisi Baik
8	Camera Mirrorless	2	unit	Kondisi Baik
9	Data External USB 2.5" 3.0 (2 tera)	20	Unit	Kondisi Baik
10	Filling Cabinet	12	Unit	Kondisi Baik
11	Infokus Besar	2	Unit	Kondisi Baik
12	Komputer Pc All In One	10	UNIT	Kondisi Baik
13	Kursi Pimpinan	6	Unit	Kondisi Baik
14	Lampu LED Video Shoting	2	Unit	Kondisi Baik
15	Laptop	5	Unit	Kondisi Baik
16	Lemari Arsip Kaca	6	Unit	Kondisi Baik
17	Meja Rapat Kapasitas 15 Orang	1	Set	Kondisi Baik
18	Meja Staff	113	Unit	Kondisi Baik

NO	KEBUTUHAN PERALATAN KANTOR	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
19	Kusi Staff	113	Unit	Kondisi Baik
20	MESIN FAX	2	Unit	Kondisi Baik
21	Modem	4	Unit	Kondisi Baik
22	Mouse Wireless	10	Unit	Kondisi Baik
23	Papan WhiteBoard	2	Unit	Kondisi Baik
24	Pointer Laser	1	Unit	Kondisi Baik
25	PORT USB 4	10	Unit	Kondisi Baik
26	PRINTER	10	Unit	Kondisi Baik
27	Rak Arsip	4	Unit	Kondisi Baik
28	TV LED 62 Inc	6	Unit	Kondisi Baik
	<b>TOTAL</b>	<b>556</b>	<b>Unit</b>	<b>Kondisi Baik</b>

Sumber: Subbagian Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2021.

Sarana-prasarana penunjang aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi tersebut sudah memadai namun dibutuhkan sarana non fisik seperti kebutuhan aplikasi (*software*) untuk mendukung sistem perencanaan, penelitian dan pengembangan yang ditunjang oleh SDM yang mengoperasikan sistem tersebut.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi dalam Bab ini diukur berdasarkan capaian kinerja Renstra periode sebelumnya dari Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) melalui tingkat pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran.

Dalam Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 terdapat 2 (dua) sasaran strategis harus dicapai oleh Bappeda Kota Bekasi sebagaimana dalam tabel di bawah berikut.

**Tabel 2.4.**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra Bappeda Kota Bekasi**  
**Tahun 2013–2018 (Perubahan III)**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2014	2015	2016	2017	2018
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1 Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) terhadap perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD)	Persen (%)	95%	95%	100%	100%	91%
			2 Tingkat keselarasan perencanaan Perangkat Daerah (RENJA dan RENSTRA) terhadap perencanaan pembangunan daerah (RKPD dan RPJMD)	Persen (%)	-	-	-	100%	100%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	A (80)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)

*Sumber: Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan III*

Gambaran capaian kinerja Bappeda Kota Bekasi dalam Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013–2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.5.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Pelayanan Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013–2018 (Renstra Perubahan III)**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Bappeda Tahun ke -					Ralisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) terhadap perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD)	-	100%	-	95%	95%	100%	100%	100%	74%	96,12%	100%	100%	91%	78%	101%	100%	100%	91%
2	Tingkat keselarasan perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	-	-	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	100%	100%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Bappeda Tahun ke -					Ralisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	(RENJA dan RENSTRA) terhadap perencanaan pembangunan daerah (RKPD dan RPJMD)																		
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-		-	A (80)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	77,46	73,02	68,50	84,05	84,13	96,83%	90,15%	83,54%	100%	100%

Sumber: Data Diolah Subbagian Perencanaan Bappeda Kota Bekasi, 2019.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Bappeda dalam tiap tahunnya dari tahun 2013-2018 telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018. Capaian kinerja ketiga indikator tersebut antara lain:

1. Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) terhadap perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD).

Capaian indikator ini tahun 2018 adalah sebesar 91%, karena jumlah program dalam RKPD Tahun 2018 sebanyak 107 program sedangkan jumlah program dalam RPJMD untuk tahun 2018 sebanyak 118 program. disebabkan adanya rasionalisasi program dan kegiatan yang telah diusulkan Perangkat Daerah sehingga program/kegiatan Perangkat Daerah yang telah diusulkan tidak dilaksanakan, dan anggaran dialihkan ke program/kegiatan yang lebih prioritas. Capaian indikator ini didukung oleh tiga program yaitu: (a) Program perencanaan pembangunan daerah, (b) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan (c) Program Pengembangan Data dan Informasi.

2. Tingkat keselarasan perencanaan Perangkat Daerah (RENJA dan RENSTRA) terhadap perencanaan pembangunan daerah (RKPD dan RPJMD).

Capaian indikator ini tahun 2018 adalah sebesar 100% karena jumlah program antara RENJA dan RKPD sama yaitu sebanyak 107 program, serta jumlah program antara RENSTRA dan RPJMD sama sebanyak 118 program. Capaian indikator ini yang oleh tiga program yaitu (a) Program perencanaan pembangunan ekonomi; (b) Program perencanaan sosial budaya, dan (c) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam,

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencapai A (nilai=84,13) di tahun 2018 akhir periode Renstra.

Capaian indikator ini tahun 2018 adalah sebesar 100% yang didukung oleh empat program yaitu (a) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, (b)

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur, (c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan (d) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain: (1) komitmen dan kapasitas aparatur Bappeda yang semakin meningkat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai tepat waktu, (2) dukungan TIK dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti pembangunan sistem informasi/aplikasi perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, (3) dukungan regulasi, SOP, petunjuk teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti pembangunan sistem informasi/aplikasi perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta (4) database pembangunan yang semakin membaik.

Dalam mencapai target sasaran tersebut, Bappeda melaksanakan beberapa 11 (sebelas) program mengacu pada RPJMD Tahun 2013-2018, yaitu sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
3. Program Perencanaan Sosial Budaya;
4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Pengembangan Data dan Informasi;
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Sementara kinerja pengelolaan pendanaan mulai tahun 2014 sampai tahun 2018 (Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013–2018), diuraikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.6.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Bekasi Tahun 2014-2018 (Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018)**

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.054.941.000	4.360.000.000	5134385000	5.475.000.000	8.150.000.000	3.234.881.800	3.426.007.238	4.814.776.308	4.530.929.774		79,78%	78,58%	93,78%	82,76%	0,00%	20%	14%
2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.175.000.000	430.000.000	1050000000	986.455.000	2.000.000.000	1.094.426.900	306.385.500	982.255.843	965.627.000		93,14%	71,25%	93,55%	97,89%	0,00%	44%	49%
3	Program Perencanaan Sosial Budaya	2.100.000.000	1.350.000.000	1084225000	2.446.415.000	1.950.000.000	1.790.684.300	1.057.899.000	841.972.678	1.766.615.238		85,27%	78,36%	77,66%	72,21%	0,00%	12%	16%
4	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	3.650.000.000	4.055.000.000	3952686000	3.399.012.000	1.900.000.000	3.516.038.000	3.387.725.750	3.887.805.000	3.299.425.600		96,33%	83,54%	98,36%	97,07%	0,00%	-12%	-1%
5	Program Pengembangan Data dan Informasi	1.825.000.000	2.610.000.000	2.330.000.000	2.070.450.000	3.850.000.000	1.672.290.950	2.309.908.800	2.168.724.900	1.999.445.937		91,63%	88,50%	93,08%	96,57%	0,00%	27%	8%
6	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.873.798.400	800.000.000		710.000.000	450.000.000	955.765.550	426.711.000	-	690.964.000		51,01%	53,34%	0,00%	97,32%	0,00%	-23%	-55%
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.016.442.000	2.234.240.000	2010350000	3.470.500.000	3.377.800.000	1.815.920.053	2.051.228.349	1.943.756.462	3.372.979.998		90,06%	91,81%	96,69%	97,19%	0,00%	18%	27%

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	535.000.000	705.000.000	1311319000	1.975.000.000	315.000.000	422.310.862	575.231.230	1.274.013.075	1.855.950.549		78,94%	81,59%	97,16%	93,97%	0,00%	21%	68%
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	130.000.000	155.000.000	164500000	403.700.000	200.000.000	125.077.000	133.961.300	164.159.000	374.900.000		96,21%	86,43%	99,79%	92,87%	0,00%	30%	53%
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.000.000	60.000.000	270500000	95.000.000	110.000.000	69.260.000	30.000.000	237.767.000	30.020.000		76,96%	50,00%	87,90%	31,60%	0,00%	67%	183%
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	230.000.000	340.000.000	343000000	312.500.000	20.000.000	217.228.000	323.586.000	289.875.685	298.097.000		94,45%	95,17%	84,51%	95,39%	0,00%	-13%	14%
	<b>TOTAL</b>	<b>17.680.181.400</b>	<b>17.099.240.000</b>	<b>17.650.965.000</b>	<b>21.344.032.000</b>	<b>22.322.800.000</b>	<b>14.913.883.415</b>	<b>14.028.644.167</b>	<b>16.605.105.951</b>	<b>19.184.955.096</b>	<b>-</b>	<b>84%</b>	<b>82%</b>	<b>94%</b>	<b>90%</b>	<b>0%</b>	<b>17%</b>	<b>34%</b>

Sumber: Data Diolah Subbagian Perencanaan Bappeda Kota Bekasi, 2019.

Berdasarkan tabel realisasi anggaran Bappeda dari tahun 2014-2018 di atas, realisasi anggaran setiap tahunnya rata-rata sekitar 90 persen, serta rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 9 persen dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggarannya sebesar 37 persen dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda dapat merealisasikan program/kegiatannya dengan baik dan semakin meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Rasio ketercapaian selama 5 (lima) tahun pelaksanaan antara realisasi dan anggaran program Renstra Bappeda tahun 2013-2018 ketercapaian tertinggi secara keseluruhan mencapai 94% pada tahun 2016 dan terendah tahun 2015 tercapai 82%, dengan rincian program sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2016 rasio realisasi tertinggi sebesar 93,78% sedangkan rasio ketercapaian terendah tahun 2014 sebesar 78,94%, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran dari 20% dan realisasi 14%.
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi rasio ketercapaian tertinggi pada terjadi pada tahun 2017 dengan realisasi 97,89% dan terendah tahun 2015 dengan realisasi 71,25% sedangkan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran melampaui dari 40% terealisasi 49%.
3. Pada tahun 2014 Program Perencanaan Sosial Budaya ketercapaian realisasi anggaran tertinggi hanya 85,27%, terendah tahun 2017 terealisasi 72,21% dengan rata-rata pertumbuhan anggaran terealisasi 16% dari 12% yang ditargetkan.
4. Ketercapaian rasio anggaran dengan realisasi Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam tertinggi mencapai 98,36% pada tahun 2016 dan terendah tahun 2015 dengan 83,54%, rata-rata pertumbuhan anggaran -12% dan realisasi -1%. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan jumlah kegiatan, dan kegiatan itu sudah selesai dilaksanakan tahun sebelumnya.
5. Program Pengembangan Data dan Informasi ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2017 dengan realisasi 96,57% dan terendah pada tahun 2015 yaitu 88,50%, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran 8% dari 27% dikarenakan penambahan jumlah kegiatan dan anggaran.

6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2017 dengan realisasi 97,32% dan terendah pada 2016 yaitu 0 dikarenakan tidak ada kegiatan, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran -55% dari -23%, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 tidak dianggarkan pada program tersebut.
7. Ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2017 dengan realisasi 97,19% dan terendah pada tahun 2014 yaitu 90,06%, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan terus meningkat anggaran 27% dari 18% untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dikarenakan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2016 dengan realisasi 97,16% dan terendah pada tahun 2014 yaitu 78,94%, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran 68% dari 21%. Hal ini karena penambahan belanja peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
9. Ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2016 dengan realisasi 99,79% dan terendah pada tahun 2015 yaitu 86,43% dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran 53% dari 30% pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Hal ini dikarenakan penambahan aparatur Bappeda sehingga perlu penambahan anggaran untuk peningkatan disiplin aparatur Bappeda.
10. Ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2016 dengan realisasi 87,90 dan terendah pada tahun 2017 yaitu 31,60%, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran 183% dari 67% Program pada Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Hal ini dikarenakan penambahan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan aparatur Bappeda.
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2017 dengan realisasi 95,39% dan terendah pada tahun 2016 yaitu 84,51% dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran 14% dari -13%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan sub kegiatan pada pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja yang selalu berhasil dilaksanakan adalah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD, RKPD, dan RTRW, serta laporan monitoring dan evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain: komitmen dan kapasitas aparatur Bappeda yang semakin meningkat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai tepat waktu, dan dukungan TIK dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti pembangunan sistem informasi/aplikasi perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta database pembangunan yang semakin membaik.

Di samping itu, dapat dilihat gambaran capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023 (murni) setelah penggabungan Bappeda dan Balitbang menjadi Bappelitbangda.

Dalam Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis harus dicapai oleh Bappelitbangda Kota Bekasi sebagaimana dalam tabel di bawah berikut.

**Tabel 2.7.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kota Bekasi  
Dalam Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 (murni)**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan penganggaran dan pelaksanaan	1.1.1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Penelitian, pengembangan Pembangunan		1. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	10%	10%	20%	40%	60%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Daerah yang Inovatif dan Berbasis Iptek		2. Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapat predikat tingkat nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	2 Predikat Tingkat Nasional
		1.1. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta Iptek dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan	1.1.1. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	10%	10%	20%	40%	60%
			1.1.2. Jumlah Iptek dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	2 Predikat Tingkat Nasional

Sumber: Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 (murni/sebelum perubahan).

Gambaran capaian kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi dalam Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.8.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Bappelitbangda Kota Bekasi sampai dengan Tahun 2021**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Ralisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	-	58,33%	88,02%	-	-	-	-	88,02%	-	-
5	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	-	-	-	10%	10%	20%	40%	60%	-	18%	25%	-	-	-	180%	125%	-	-
6	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional	-	-	-	1 Predikat Tingkat Nasional	2 Predikat Tingkat Nasional	-	2 Predikat	2 Predikat Tingkat Nasional	-	-	-	200%	200%	-	-			
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	-	-	-	81,47	83,91	86,43	88,16	89,92	85,96	81,47	81,94	-	-	106%	97%	94,80%	-	-

Dari tabel tersebut di atas dapat dianalisis capaian kinerja Bappelitbangda dari tahun 2019-2021, antara lain:

### **1. Tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen penganggaran daerah**

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2019 dan 2020 sesuai Renstra Bappeda 2018-2023 (sebelum bergabung dengan Balitbang menjadi Bappelitbangda). Capaian indikator ini pada tahun 2019 sebesar 99,53% tidak mencapai target 100%, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 100%.

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target adalah terdapatnya 2 (dua) Program RPJMD yang tidak dilaksanakan pada RKPD tahun 2019 yaitu: (1) Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dan (2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Hal ini disebabkan oleh : (1) Adanya perubahan kebijakan prioritas tahun 2020, dimana tahun 2020 fokus pada sarana dan prasarana kota, sedangkan terkait iklim penanaman modal fokus di tahun 2021 terkait upaya peningkatan ekonomi; (2) Terdapat pergeseran kegiatan yang sebelumnya terdapat dalam Program wawasan kebangsaan, menjadi beralih ke dalam program lain yaitu Program Pengelolaan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Pembinaan Bela Negara dan kegiatan Penyelenggaraan Sinergitas Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

### **2. Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan**

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2019 dan 2020 sesuai Renstra Bappeda 2018-2023 (sebelum bergabung dengan Balitbang menjadi Bappelitbangda). Capaian indikator ini pada tahun 2019 sebesar 100% demikian pula pada tahun 2020 sebesar 100%.

Adapun faktor penentu keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut antara lain: (1) Adanya komitmen Tim dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan agar tepat waktu penyusunannya dan tepat aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan secara rinci sehingga dokumen perencanaan pembangunan dapat selesai disusun sesuai waktu yang ditentukan.

### **3. Tingkat kualitas data perencanaan**

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2019 dan 2020 sesuai Renstra Bappeda 2018-2023 (sebelum bergabung dengan Balitbang menjadi Bappelitbangda). Capaian indikator ini pada tahun 2019 sebesar 100% demikian pula pada tahun 2020 sebesar 100%.

Adapun faktor penentu keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut antara lain: (1) Adanya komitmen Tim dalam meningkatkan kualitas data perencanaan sesuai dengan kebutuhan; (2) Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Tim Bappelitbangda dan Tim Perangkat Daerah dalam menyediakan data yang dibutuhkan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan sehingga kualitas data dapat dicapai.

### **4. Indeks perencanaan pembangunan daerah**

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai Renstra Bappelitbangda 2018-2023 Perubahan (Bappeda bergabung dengan Balitbang menjadi Bappelitbangda). Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 88,02% belum dapat mencapai target 100%.

Adapun faktor penyebab kegagalan indikator “Indeks perencanaan pembangunan daerah”, adalah dimana dari 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota terdapat 16 IKU yang tercapai, dan 9 IKU belum tercapai, dan 1 IKU belum tersedia datanya. IKU yang belum tercapai targetnya banyak dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi adalah pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari Perangkat Daerah terhambat/beberapa terlambat sehingga waktu pengumpulan dan pengolahan data serta perumusan analisis dan rekomendasi menjadi lebih singkat.

Rekomendasinya adalah untuk 9 IKU yang belum dapat mencapai target agar diidentifikasi faktor penyebabnya dan dirumuskan rencana aksi tindak lanjut pencapaiannya agar tahun depan dapat mencapai target yang ditetapkan karena Tahun 2023 adalah tahun terakhir dari periode Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

## **5. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan**

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai Renstra Bappelitbangda 2018-2023 Perubahan (Bappeda bergabung dengan Balitbang menjadi Bappelitbangda). Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 25% telah mencapai bahkan melebihi target 10%.

Faktor penyebab keberhasilan untuk indikator “Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan” adalah Bappelitbangda menggunakan sumberdaya SDM dan Anggaran dengan efisien melalui pendayagunaan kandidat fungsional peneliti dalam penelitian mandiri serta Perjanjian Kerjasama Penelitian Bersama (Joint Research) dengan Perguruan Tinggi di Kota Bekasi dengan pola penelitian dengan pendanaan dari perguruan tinggi tersebut. Pola kerjasama yang disepakati adalah Joint Research yaitu penelitian bersama dengan menggunakan sumberdaya manusia bersama yaitu peneliti Bappelitbangda dan dosen kampus. Skema ini disepakati agar terjadi transfer knowledge dan meningkatkan jam terbang peneliti Bappelitbangda. Aspek pendanaan penelitian disepakati dibiayai seluruhnya oleh Perguruan Tinggi mitra dengan tema penelitian berasal dari rencana strategis Bappelitbangda.

## **6. Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat**

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai Renstra Bappelitbangda 2018-2023 Perubahan (Bappeda bergabung dengan Balitbang menjadi Bappelitbangda). Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 2 predikat telah mencapai bahkan melebihi target 1 predikat.

Faktor keberhasilan indikator “Jumlah IPTEK dan Inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional” tersebut adalah upaya Bappelitbangda yang berinisiatif memulai sinergitas Bappelitbangda yakni proses koordinasi dan sinergi penyusunan Indeks Inovasi Daerah dengan melakukan berbagai tahapan dimulai dengan evaluasi penyusunan Indeks Inovasi tahun 2019. Evaluasi pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah dilakukan melalui rapat internal Bappelitbangda yang menyepakati perubahan strategi penyusunan Indeks tersebut yakni dimulai dengan perencanaan penyusunan tahun 2020 yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, kemudian rencana

itu diimplementasikan melalui kegiatan Bekasi Innovation Week dimana masing-masing Perangkat Daerah akan berkompetisi membuat inovasi Perangkat Daerah yang kemudian diberikan penghargaan.

## **7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda**

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai Renstra Bappelitbangda 2018-2023 Perubahan (Bappeda bergabung dengan Balitbang menjadi Bappelitbangda). Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 81,94 (Kategori A), belum mencapai target sebesar 86,43.

Faktor penyebab kegagalan/belum berhasilnya indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BAPPELITBANGDA” mencapai targetnya adalah (1) evaluasi kinerja baru dilaksanakan sebatas pelaksanaan program dan kegiatan hingga level IV, sedangkan kinerja level di bawahnya (staf) belum dilakukan pengukuran secara berjenjang; (2) Hasil pengukuran kinerja belum dijadikan dasar untuk pemberian *reward* dan *punishment*. *Reward* dan *punishment* saat ini diimplementasikan hanya sebatas pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui absensi yang diakumulasi pada aplikasi Sikerja tetapi belum dapat diimplementasikan terhadap kinerja yang dihasilkan.

Dalam mencapai target-target kinerja sasaran tersebut, tahun 2019 dan 2020 selama masih Bappeda dan Balitbang melaksanakan beberapa program yaitu sebagai berikut:

1. Program formulasi dokumen, koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penyusunan dokumen perencanaan;
2. Program Kelitbang Utama dan Pendukung;
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Selanjutnya Bappelitbangda pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dalam mencapai target-target kinerja sasaran tersebut melaksanakan beberapa 4 (empat) program yaitu sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Sementara kinerja pengelolaan pendanaan mulai tahun 2019 sampai tahun 2023 diuraikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.9.**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2019 - 2021**

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program formulasi dokumen, koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penyusunan dokumen perencanaan	6.958.721.400	5.519.406.930	-	-	-	5.138.361.745,00	3.926.277.500	-	N/A	N/A	74%	71%	-	-	-	-21%	-24%
2	Program Kelitbangan Utama dan Pendukung	-	1.050.000.000	-	-	-	-	955.489.500	-	N/A	N/A	-	91%	-	-	-	N/A	N/A
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.661.437.021	4.188.200.000	-	-	-	2.759.928.938,00	3.656.174.949	-	N/A	N/A	75%	87%	-	-	-	14%	32%
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	322.000.000	290.000.000	-	-	-	89.743.674,00	234.132.766	-	N/A	N/A	28%	81%	-	-	-	-10%	161%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	0%	-	-	-	-	N/A	N/A
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.450.000	-	-	-	-	9450000	-	-	N/A	N/A	24%	-	-	-	-	N/A	N/A
7	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;	-	-	2.683.096.830	3.825.735.000	3.640.510.000	-	-	2.206.361.800	N/A	N/A	N/A	N/A	82%	N/A	N/A	19%	N/A
8	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	2.826.823.500	2.210.146.600	1.507.065.000	-	-	2.404.298.000	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	-27%	N/A

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
9	Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	910.000.000	887.324.000	1.329.021.800	-	-	896.667.993	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	N/A	N/A	24%	N/A
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	22.999.942.000	25.452.151.520	25.343.596.020	-	-	21.959.467.493	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	5%	N/A
	<b>TOTAL</b>	<b>11.001.608.421</b>	<b>11.047.606.930</b>	<b>29.419.862.330</b>	<b>32.375.357.120</b>	<b>31.820.192.820</b>	<b>7.997.484.357</b>	<b>8.772.074.715</b>	<b>27.466.795.286</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>72,69%</b>	<b>79,40%</b>	<b>93,36%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>5%</b>	<b>N/A</b>

Sumber: Data Diolah Subbagian Perencanaan Bappeda Kota Bekasi, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, anggaran program tahun 2019 sebesar Rp 11.001.608.421,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 11.047.606.930,00.

Selanjutnya anggaran program tahun 2021 sebesar Rp 29.419.862.330,00, tahun 2022 sebesar Rp 32.375.357.120,00 dan tahun 2023 sebesar Rp 31.820.192.820,00.

Jumlah anggaran program 2019 dan 2020 relatif lebih kecil daripada anggaran program tahun 2021, 2022 dan 2023 karena tahun 2019 dan 2020 tidak memasukkan anggaran belanja tidak langsung gaji dan tunjangan, sedangkan tahun 2021, 2022 dan 2023 sudah termasuk belanja gaji dan tunjangan (menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

Apabila dilihat realisasinya, realisasi anggaran program setiap tahunnya rata-rata sekitar 81,82% dengan rincian tahun 2019: 72,69%, tahun 2020: 79,40%, dan tahun 2021: 93,36%) serta rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda/Bappelitbangda dapat merealisasikan program/kegiatannya dengan baik dan semakin meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi, yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Tantangan Bappelitbangda Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan regional, nasional, maupun global serta saling pengaruh antara berbagai faktor di dalamnya merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, seperti dampak adanya pandemi wabah Covid-19 mengharuskan untuk melakukan *refocusing* skala prioritas dalam rencana pembangunan dan penganggaran untuk penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19. Untuk itu, kajian atau penelitian dan pengembangan yang dilakukan Bappelitbangda fokus pada penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 tersebut;

2. Peningkatan koordinasi dan keselarasan kegiatan pembangunan perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah, lintaswilayah dalam lingkup regional dan nasional termasuk dalam rangka penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19;
3. Peningkatan tuntutan masyarakat terhadap produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas termasuk dalam rangka penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19;
4. Penyediaan dan *update* data hasil pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan;
5. Revisi RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031 yang sedang dalam proses penyusunan perlu disosialisasikan dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan lainnya.
6. Memastikan rekomendasi pemanfaatan ruang ditindaklanjuti sesuai mekanisme/ pedoman;
7. Memastikan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah;
8. Peningkatan daya saing wilayah sekitar menuntut percepatan pembangunan di segala bidang;
9. Pembangunan ekonomi kreatif Kota Bekasi harus menjadi salah satu prioritas utama. Untuk itu peran dari Bappelitbangda Kota Bekasi sangat penting dalam menyusun kajian atau penelitian terkait ekonomi kreatif Kota Bekasi, termasuk dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19;
10. Posisi strategis Kota Bekasi terhadap Provinsi DKI Jakarta, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Kota Bekasi, khususnya di bidang IPTEK. Dengan demikian, perlu peningkatan daya saing sumber daya manusia, kelembagaan, serta berbudaya IPTEK.
11. Terbentuknya Sistem Inovasi dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). SDM Bappelitbangda kurang memadai. Oleh karena itu, perlunya ditopang dengan sinergi dan kerjasama satu sistem ntuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinststitusi pemerintah, Pemda, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, dan komunitas serta Masyarakat di Kota Bekasi.
12. Bappelitbangda harus mampu menghasilkan kajian dan analisis di berbagai bidang pembangunan serta mampu untuk menciptakan

berbagai inovasi yang ramah lingkungan dan murah namun berkualitas sehingga dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Kota Bekasi, termasuk dalam rangka penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19.

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Bappelitbangda Kota Bekasi yaitu:

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis dan otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peran Bappelitbangda sebagai perencana semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi pegawai;
5. Menunjang rencana persiapan dan pembangunan *Bekasi City Techno Park, Bekasi City Start-Up*, dan Bekasi Creative sebagai prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Dengan adanya regulasi ini, maka suatu kota didorong untuk melaksanakan penguatan inovasi daerah. Bappelitbangda dapat memfasilitasi pengembangan inovasi dan jaringan inovasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
7. Pembangunan di bidang ekonomi yaitu promosi investasi ekonomi dan ekonomi kreatif (termasuk UKM/UMKM) yang belum berkembang serta optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan. Hal ini menjadi peluang bagi Bappelitbangda untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, pengoperasian, penerapan dan

perekayasaan dalam menumbuhkembangkan inovasi bagi percepatan dan perluasan pembangunan sosial dan ekonomi. Bappelitbangda dapat menyusun perencanaan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bekasi;

8. Era globalisasi menuntut produk harus memenuhi kompetensi harga, kompetensi kualitas dan spesifikasi produk (barang/jasa). Hal ini menjadi peluang lebar untuk melaksanakan terobosan-terobosan baru dengan mengusung ekonomi berbasis sumberdaya lokal Kota Bekasi, baik itu modal sosial, sumber daya alam maupun sumberdaya manusia;
9. Dukungan terhadap target capaian SDGs Kota Bekasi, khususnya Tujuan 9, yaitu industri, inovasi dan infrastruktur, dengan membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN**  
**FUNGSI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan terkait tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut.

Dokumen perencanaan pembangunan saat ini belum relevan dengan peraturan tersebut. Dengan demikian, dipandang perlu melakukan perubahan nomenklatur program dan kegiatan serta munculnya subkegiatan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 termasuk Bappelitbangda dengan mengacu pada perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

2. Adanya wabah pandemi Covid-19 sejak Maret tahun 2020 berdampak terhadap perekonomian karena menurunkan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Hal ini mengakibatkan banyak rencana pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran pembangunannya yang dari pendapatan daerah tidak tercapai.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi melalui Bappelitbangda melakukan evaluasi dan kaji ulang terhadap dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Renstra Tahun 2018-2023 serta Renja yang berfokus pada penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak

pandemi Covid-19 dan isu-isu terkini lainnya;

3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan perencanaan yang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas perbatasan Kota Bekasi.

Dalam perumusan perencanaan pembangunan selama ini masih hanya mengikutsertakan kabupaten/kota wilayah yang berbatasan dengan Kota Bekasi dalam Musrenbang Tingkat Kota dan tidak secara detil menelaah dokumen rencana pembangunan kabupaten/kota wilayah yang berbatasan dengan Kota Bekasi.

4. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya sistem pengendalian dan belum dapat diimplementasikan SOP atau pedoman untuk pengendalian.
5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi.

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah selama ini masih difokuskan hanya sebatas realisasi kegiatan fisik dan anggaran yang diinput dalam sistem *E-Monev*, belum semua Perangkat Daerah menyampaikan capaian kinerja *outcome* (program) dan IKU, serta sasaran.

6. Belum lengkapnya data dan informasi sektoral yang diperlukan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah sektoral.

Data dan informasi sektoral misalnya terkait pengembangan ekonomi kreatif terkini di Kota Bekasi belum tersedia lengkap.

7. Belum optimalnya pemanfaatan dan analisis data untuk perencanaan pembangunan. Pengelolaan dan pemutakhiran database untuk perencanaan pembangunan senantiasa dilakukan melalui sistem *E-Database*. Namun pemanfaatan analisis datanya masih minim.
8. Masih terbatasnya aparatur perencana yang memiliki kompetensi untuk menyusun perencanaan pembangunan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan secara baik dan akuntabel.
9. Belum optimal pemanfaatan hasil kelitbangan untuk kebijakan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah di Kota Bekasi.

**Tabel 3.1.**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya perencanaan pembangunan Kota Bekasi	1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan perencanaan yang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas perbatasan Kota Bekasi masih tidak optimal	1. Regulasi yang belum jelas dalam kerjasama antar daerah
		2. Ego sektoral di Perangkat Daerah dan Kab/Kota di Perbatasan	
		2. Pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan tidak optimal	1. Regulasi pengendalian pembangunan belum tersedia
		2. SOP atau pedoman dan sistem untuk pengendalian belum tersedia	
		3. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi tidak optimal	1. Kurangnya Komitmen Perangkat daerah
		2. Belum dilaksanakan monev secara benar dan menyeluruh	
		4. Data dan informasi sektoral yang diperlukan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah sektoral tidak lengkap	1. Kurangnya kajian analisis/riset di Kota Bekasi
		2. Belum dimanfaatkan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	
		5. Aparatur perencana yang memiliki kompetensi terbatas	1. Alokasi anggaran pengembangan kapasitas aparatur perencana terbatas
		2. Rendahnya kesempatan pengembangan kapasitas	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			bagi aparatur
2.	Belum optimalnya kebijakan pembangunan yang berbasis penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek dan inovasi daerah.	Belum optimal pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek dan inovasi daerah untuk mendukung kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya hasil kelitbangan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat</li> <li>2. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan hasil penelitian</li> <li>3. Masih terbatasnya <i>data base</i> (sistem informasi) penelitian dan pengembangan</li> <li>4. Belum optimalnya sosialisasi hasil-hasil kelitbangan</li> <li>5. Belum adanya <i>link and match</i> antara kebutuhan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan</li> <li>6. Belum terbangunnya ekosistem inovasi</li> </ol>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Hasil identifikasi Perangkat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2018-2023 adalah **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”**. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam misi yang terdiri dari:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdayasaing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Ditinjau dari misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2018-2023, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda adalah misi ke-1 yaitu **“meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik”**.

Adapun tujuan dalam rangka melaksanakan misi ke-1 tersebut adalah **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”** dengan indikator kinerja **“Indeks Reformasi Birokrasi”**, Tujuan tersebut mempunyai sasaran **“Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah”** dengan indikator kinerja **“Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”**.

Keterkaitannya dengan tugas pokok Bappelitbangda dalam bidang perencanaan yaitu perumusan perencanaan pembangunan daerah yang

menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang menjadi komponen utama dalam evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Hal ini berkenaan dengan esensi dari perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah tersebut harus memastikan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode Tahun 2018-2023 dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).

Dengan demikian, untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 tersebut, Bappelitbangda melaksanakan program dan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 sampai dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi. Di samping itu, untuk menjabarkan RPJMD Tahun 2018-2013 ke dalam dokumen perencanaan tahunannya yaitu RKPD, dilaksanakan kegiatan penyusunan RKPD dari Tahun 2019 sampai dengan RKPD Tahun 2023.

Hal ini sejalan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Apabila ditelaah, IKK terkait Bappelitbangda yaitu:

1. Kesesuaian prioritas pembangunan;
2. Urusan wajib yang diselenggarakan daerah; dan
3. Penjabaran program RPJMD dalam RKPD.

Selanjutnya untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi baik RPJMD maupun RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka Bappelitbangda melaksanakan pendampingan penyusunan dan verifikasi perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Bekasi.

Selain itu, tugas pokok Bappelitbangda dalam bidang penelitian dan pengembangan yaitu melalui pemanfaatan hasil kelitbang yang berkualitas di berbagai bidang pembangunan, serta inovasi dan teknologi.

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.2.**

**Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bappelitbangda Kota Bekasi dalam Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Terpilih Periode Tahun 2018-2023**

<b>Visi: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan</b>				
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik	1. Belum optimalnya koordinasi dalam perumusan perencanaan yang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas perbatasan Kota Bekasi.	Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan sehingga permasalahan seringkali ditangani secara parsial dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat dan cepat.	Meningkatnya forum-forum koordinasi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.
		2. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi.	Belum tersedianya sistem pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi.	Kemajuan perkembangan TIK yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan

**Visi: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan**

No.	Misi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				daerah Kota Bekasi.
		3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi.	1. Belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi. 2. Belum optimalnya komitmen Perangkat Daerah dalam melakukan evaluasi kinerja utamanya (outcome).	Telah terbangunnya sistem monitoring dan evaluasi (e-monev) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daderah (SIENCANG).
		4. Belum lengkapnya data dan informasi sektoral yang diperlukan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi.	1. Belum optimalnya mekanisme pengumpulan data sektoral yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi. 2. Belum optimalnya komitmen Perangkat Daerah dalam menyediakan data dan informasi sektoral yang diperlukan dalam	Telah terbangunnya sistem pengumpulan data pembanguan daerah Kota Bekasi (e-database)

**Visi: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan**

No.	Misi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi.	
		5. Belum optimal pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek dan inovasi daerah untuk mendukung kebijakan, karena kualitas perencanaan dan penjamin mutu belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya hasil kelitbangan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat;</li> <li>2. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan hasil penelitian;</li> <li>3. Masih terbatasnya data base (sistem informasi) penelitian dan pengembangan;</li> <li>4. Kurangnya sosialisasi hasil-hasil kelitbangan;</li> <li>5. Belum adanya <i>link and match</i> antara kebutuhan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;</li> <li>6. Belum terbangunnya</li> </ol>	

Visi: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan				
No.	Misi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			ekosistem inovasi.	

**Tabel 3.3**

**Faktor Penghambat Pencapaian Misi Pembangunan Kota Bekasi**

NO	MISI	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik	Penelitian dan pengembangan di Kota Bekasi belum ditunjang oleh oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi digitalisasi ke dalam sistem pemerintah
2	Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memada	1. belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan hasil penelitian 2. belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk litbang sarana-prasarana
3	Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing	Infrastruktur jaringan informasi, kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas yang masih terbatas dan biaya jasa akses 2. Lingkungan bisnis; kondisi pasar, system perdagangan dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan industry kreatif belum mendukung
4	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat,	Difusi teknologi dalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi belum menjadi budaya

NO	MISI	FAKTOR PENGHAMBAT
	berakhlak mulia, kreatif dan inovatif	
5	Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman	Standarisasi, keamanan informasi, otentikasi dan berbagai aplikasi dasar yang menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat, keandalan interoperabilitas antar situsnya kurang mendapat perhatian

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keselarasan, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang akan ditangani pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota periode berikutnya.

Renstra K/L terkait Bappelitbangda yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024).

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN 2020-2024, dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 (Permen PPN/Perka Bappenas Nomor 11 Tahun 2020), Kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi yaitu **“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Misi tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

2. Misi-2 : Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan 2020-2024, sebagai berikut:

1. Tujuan-1 (pada Misi 1): Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
2. Tujuan-2 (pada Misi 1): Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Tujuan-3 (pada Misi 2): Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

1. Sasaran Strategis 1 (pada Tujuan 1): Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Sasaran Strategis 2 (pada Tujuan 1): Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Sasaran Strategis 3 (pada Tujuan 2): Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Sasaran Strategis 4 (pada Tujuan 3): Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Ditinjau dari Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut di atas, memiliki keselarasan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi. Sasaran Strategis Pertama Kementerian PPN/Bappenas yaitu “terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional”, selaras dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi, yaitu menyusun rencana pembangunan daerah yang terintegrasi, sinkron dan sinergi, sebagaimana tertuang di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Sasaran Strategis Kedua Kementerian PPN/Bappenas “Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional” selaras dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda dalam hal pengendalian pembangunan daerah.

Sasaran Strategis Ketiga Kementerian PPN/Bappenas “Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner” selaras dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda dalam hal pencapaian kinerja yang akuntabel.

Demikian pula untuk Sasaran Strategis Keempat Kementerian PPN/Bappenas “Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM” selaras dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda dalam hal pencapaian kinerja yang akuntabel.

Selain Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Bappelitbangda juga menelaah Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri).

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN 2020-2024, dalam Renstra Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-444 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020-2024, Badan Litbang Kemendagri menetapkan visi yaitu **“Menjadi Mitra Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan yang Responsif, Antisipatif, dan Inovatif.”**

Pernyataan visi tersebut seutuhnya guna mewujudkan Visi: **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”** serta diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Dalam melaksanakan visi dan mendukung pencapaian misi Kemendagri, Badan Litbang Kemendagri menetapkan misi:

1. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (*research based policy*).
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mewujudkan kelembagaan litbang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

Kemendagri telah menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang meliputi:

1. Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Badan Litbang Kemendagri menetapkan beberapa sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sepanjang tahun 2020-2024:

1. Untuk mewujudkan T1, ditetapkan sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan, dengan indikator sasaran strategis, yaitu: Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.
2. Untuk mewujudkan T2, ditetapkan sasaran strategis, yaitu:
  - a. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri, dengan indikator sasaran strategis, yaitu: pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan.
  - b. Meningkatnya keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri, dengan indikator sasaran strategis, yaitu: Keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam penyusunan kebijakan.
3. Untuk mewujudkan T3, ditetapkan sasaran strategis, yaitu:
  - a. Tersedianya kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah, dengan indikator sasaran strategis, yaitu Jumlah kebijakan inovasi daerah yang dihasilkan.
  - b. Peningkatan jumlah daerah yang berinovasi, dengan indikator sasaran strategis, yaitu Daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan inovasi daerah berdasarkan indeks inovasi daerah.
  - c. Meningkatnya kualitas inovasi daerah, dengan indikator sasaran strategis, Persentase daerah dengan kategori “inovatif” dan “sangat

inovatif” berdasarkan peta pembinaan inovasi daerah.

4. Untuk mewujudkan T4, ditetapkan sasaran strategis, yaitu:

a. Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan, dengan indikator sasaran strategis:

(1) Terselenggaranya rencana program dan anggaran Badan Litbang Kemendagri berpedoman pada Rencana Kerja Kemendagri.

(2) Tersedianya Organisasi yang optimal dan SDM yang kompeten.

b. Pembinaan dan penguatan kelembagaan litbang daerah, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:

(1) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah yang berkategori “utama”.

(2) Terfasilitasinya rencana induk kelitbangan daerah.

(3) Terfasilitasinya penyediaan sumber daya manusia fungsional kelitbangan daerah.

Ditinjau dari Sasaran Strategis Badan Litbang Kemendagri tersebut di atas, memiliki keselarasan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi, antara lain: (1) meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan; (2) meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri; dan (3) meningkatnya kualitas inovasi daerah.

Berdasarkan penelaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024 dan permasalahan pada Bappelitbangda Kota Bekasi dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**

**Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bappelitbangda Kota Bekasi Dintinjau dari Sasaran Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dan Badan Litbang Kemendagri**

No.	Sasaran	Permasalahan Bappelitbangda	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	<b>Renstra Kementerian PPN/ Bappenas</b>			
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring	1. Belum terintegrasi secara menyeluruh sistem informasi perencanaan, penganggaran pembangunan, sampai evaluasi	1. Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); 2. Meningkatnya forum-forum

No.	Sasaran	Permasalahan Bappelitbangda	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		dan evaluasi pembangunan daerah.	kinerja pembangunan daerah; 2. Belum tersedianya dashboard evaluasi pembangunan daerah dalam SIPD.	perencanaan pembangunan antara daerah dan pusat dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah	1. Belum tersedianya regulasi pemanfaatan terkait pengendalian pembangunan daerah; 2. Belum tersedianya pedoman dan mekanisme yang jelas bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengendalian untuk memastikan terlaksananya program dalam mencapai sasaran pembangunan.	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.
		Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.	Belum tersedianya pedoman pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; Belum tersedianya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terkait hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam sistem monitoring dan evaluasi pembangunan.
3.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Masih belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi implementasi SAKIP terutama hasil monev/penilaian kinerja.	Terdapat perubahan regulasi terkait implementasi penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam implementasi SAKIP.
	<b>Renstra Badan Litbang Kemendagri</b>			

No.	Sasaran	Permasalahan Bappelitbangda	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan;	Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat.	Masih terbatasnya data base (sistem informasi) penelitian dan pengembangan	Tersedianya pemanfaatan TIK dan kelembagaan dalam menunjang penelitian dan pengembangan
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri;	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek dan inovasi daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan.	Belum optimalnya sistem atau kebijakan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan.	Terbangunnya sistem pengelolaan data kelitbang.
3.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah.	Belum optimalnya ekosistem penelitian dan inovasi daerah guna transformasi layanan masyarakat yang bersifat dinamis.	Belum optimalnya penerapan iptek dan inovasi daerah berbasis partisipasi masyarakat	Terselenggaranya event lomba inovasi daerah

Di samping Renstra K/L yang harus ditelaah, perlu ditelaah juga Renstra Provinsi. Pertama, yang ditelaah adalah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Dalam mendukung pencapaian Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu “ **Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**”, Misi yang dilaksanakan oleh Bappeda adalah Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dalam Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah:

Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Jawa Barat.

Sasaran : 1. Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.
- Indikator : 1. Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa  
Sasaran Barat;  
(IKU) 2. Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian  
SAKIP Provinsi;  
3. Tingkat pemenuhan dukungan manajemen  
perkantoran.

Ditinjau dari Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut, memiliki keselarasan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi, yaitu meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Kedua, yang ditelah adalah Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat.

Dalam mendukung pencapaian Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu “ **Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**”, Misi yang dilaksanakan oleh BP2D Provinsi Jawa Barat adalah Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dalam Perubahan Renstra BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah:

- Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Jawa Barat Berbasis Penerapan IPTEK.
- Indikator : Persentase hasil kelitbangan yang diserahkan untuk  
Tujuan dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan Biro Pemprov.  
Jabar/Pemerintah Kab. Dan Kota di Jabar/  
Masyarakat/ Dunia Usaha/ Pihak Lainnya.
- Sasaran : Meningkatnya hasil kelitbangan yang didiseminasikan  
kepada Perangkat Daerah dan Biro Pemprov.  
Jabar/Pemerintah Kab. dan Kota di Jabar/Masyarakat/  
Dunia Usaha/ Pihak Lainnya.
- Indikator : Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada  
Sasaran Perangkat Daerah dan Biro Pemprov. Jabar/ Pemerintah  
(IKU) Kab. dan Kota di Jabar/Masyarakat/ Dunia Usaha/Pihak  
Lainnya.

Ditinjau dari substansi Sasaran Strategis BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut, memiliki keselarasan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi, yaitu meningkatnya hasil kelitbangan.

Berdasarkan penelaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat dan BP2D Provinsi Jawa Barat dan permasalahan pada Bappelitbangda Kota Bekasi dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.5.**

**Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bappelitbangda Kota Bekasi Dintinjau dari Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat dan BP2D Provinsi Jawa Barat**

No.	Sasaran	Permasalahan Bappelitbangda	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	<b>Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat</b>			
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;</li> <li>2. Belum tersedianya dashboard evaluasi pembangunan daerah dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) sehingga evaluasi dilakukan melalui sistem yang berbeda.</li> <li>3. Belum terintegrasinya pelaksanaan pembangunan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk tujuan bersama (bersifat inkremental-sektoral);</li> <li>4. Kualitas SDM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);</li> <li>2. Meningkatnya forum-forum perencanaan pembangunan antara daerah dan pusat dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan nasional.</li> </ol>

No.	Sasaran	Permasalahan Bappelitbangda	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			Aparatur perencanaan pembangunan kurang memadai dan belum bertransformasi secara dinamis menyesuaikan kondisi aktual ( <i>disruption adaptive</i> ).	
		Belum digunakannya sistem perencanaan berbasis data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terintegrasinya data pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah.</li> <li>2. Belum tersedianya sistem Satu Data sebagai dasar perencanaan pembangunan lintas sektor dan urusan</li> <li>3. Masih lemahnya koordinasi perencanaan antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan.</li> </ol>	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.
2.	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.	Belum optimalnya manajemen kinerja organisasi	Masih belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi implementasi SAKIP terutama hasil monev/penilaian kinerja.	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam implementasi SAKIP.
	<b>Renstra BP2D Provinsi Jawa Barat</b>			
1.	Meningkatnya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan Biro Pemprov. Jabar/Pemerintah Kab. dan Kota di Jabar/Masyarakat/ Dunia Usaha/ Pihak Lainnya	Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terbangunnya ekosistem penelitian dan inovasi daerah guna transformasi layanan masyarakat yang bersifat dinamis.</li> <li>2. Belum adanya sistem atau kebijakan daerah yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya pemanfaatan TIK dan kelembagaan dalam menunjang penelitian dan pengembangan;</li> <li>2. Terbangunnya sistem pengelolaan data kelitbangan;</li> <li>3. Terselenggaranya event lomba inovasi daerah.</li> </ol>

No.	Sasaran	Permasalahan Bappelitbangda	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>mengatur tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan.</p> <p>3. Kurangnya kesesuaian (link and match) antara kebutuhan layanan masyarakat dengan pelaksanaan penelitian dan inovasi yang dilakukan.</p>	

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan tinjauan terhadap kebijakan tata ruang wilayah makro yang tertuang baik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Kawasan Tertentu Jabotabek, dan posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta, berbagai kebijakan pembangunan di Kota Bekasi berorientasi untuk kepentingan nasional.

Dalam struktur tata ruang wilayah makro, Kota Bekasi diarahkan pengembangannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus menjadi bagian dari kawasan pengimbang (counter magnet) DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, dan permukiman. Kebijakan pembangunan tersebut umumnya sangat strategis dan dominan, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pembangunan di Kota Bekasi.

RTRW Kawasan Jabotabek dijabarkan ke dalam RTRW DKI Jakarta dan RTRW Kota/Kabupaten Tangerang, Bogor, dan Bekasi dengan tetap memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Barat. Pada sisi lain, RTRW Kawasan Jabotabek juga akan diakomodasikan ke dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, agar tercapai juga sinergi di antara Jawa Barat dan Jabotabek.

RTRW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang di wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK yaitu “Mewujudkan Kota Bekasi Sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif Yang Nyaman Dengan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan”. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bekasi meliputi:

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. Pengembangan sistem jaringan air bersih yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang

terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;

- l. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya dan parasana dan sarana pendukungnya;
- m. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- n. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Berdasarkan review RTRW Kota Bekasi tahun 2011-2031 sesuai Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011, maka untuk bidang kelitbangan masih dibutuhkan penjabaran lebih rinci terkait penentuan lokasi pusat inovasi beserta infrastuktur pndukunyananya serta indikasi program pembangunannya. Diharapkan pada tahap revisi RTRW, maka peran dari bidang kelitbangan dapat ditingkatkan. Berdasarkan draft revisi, maka terdapat program kewilayahan yang mana bidang kelitbangan dapat terlibat. Program tersebut adalah rencana pembangunan *Bekasi City Techno Park*. Bidang inovasi dan teknologi merupakan salah aspek yang nantinya ada techno park ini.

Terkait dengan KLHS khususnya terhadap dukungan terhadap target capaian SDGs Kota Bekasi, khususnya Tujuan 9, yaitu industri, inovasi dan infrastruktur, dengan membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Hal ini perlu dilakukan, karena pada saat ini belum menjadi kebijakan utama Kota Bekasi. Kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK maupun inovasi dalam rangka pencapaian target-target SDGs Kota Bekasi harus lebih didorong.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan

hidup."

Permasalahan yang muncul dan mengemuka saat ini adalah terkait lingkungan hidup, dimana terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang berdampak pada kehidupan manusia dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, isu lingkungan hidup penting untuk diintegrasikan di dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Isu Strategis Kota Bekasi berdasarkan capaian SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Program Prioritas Rancangan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 seperti pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.6.**

**Isu Strategis Kota Bekasi berdasarkan capaian SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Program Prioritas**

NO	ISU STRATEGIS KOTA BEKASI BERDASARKAN CAPAIAN TPB	PROGRAM PRIORITAS RPJMD KOTA BEKASI
1	Kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penguatan sistem tata kelola layanan KARTU SEHAT (KS) Berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional;</li> <li>2) Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan (perwujudan <i>smart health</i>);</li> <li>3) Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu (pendidikan, kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial);</li> <li>4) Pembangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);</li> <li>5) Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</li> </ol>
2	Pekerjaan layak dan dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi Kota Bekasi;</li> <li>2) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja pelaku UMKM</li> <li>3) Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan "<i>Bekasi City Techno Park</i>";</li> <li>4) Pengembangan <i>creative society</i> melalui penyelenggaraan event "<i>BEKASI CREATIVE</i>" di tingkat kota dan, kecamatan.</li> <li>5) Pengelolaan event "<i>car free day</i>" yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan;</li> </ol>
3	Industri, inovasi dan infrastruktur (TPB 9)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas;</li> <li>2) Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi,</li> </ol>

NO	ISU STRATEGIS KOTA BEKASI BERDASARKAN CAPAIAN TPB	PROGRAM PRIORITAS RPJMD KOTA BEKASI
		<p>pengembangan usaha baru, dan Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja;</p> <p>3) Pembentukan “BEKASI CITY START-UP”, melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru;</p>
4	Berkurangnya kesenjangan (TPB 10)	<p>1) Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu (pendidikan, kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial);</p> <p>2) Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja</p> <p>3) Pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;</p> <p>4) Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako;</p>
5	Kota dan permukiman yang berkelanjutan (TPB 11)	<p>1) Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka pemassalan olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, di tingkat kota dan lingkungan masyarakat;</p> <p>2) Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan</p> <p>3) Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha</p> <p>4) Penyediaan angkutan publik massal;</p>
6	Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab (TPB 12)	<p>1) Pengembangan layanan publik berbasis IT;</p> <p>2) Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi “Smart Waste “Smart Waste Management”, dan konversi “Waste to Energy”;</p> <p>3) Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT;</p>
7	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan (TPB 16)	<p>1) Peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya</p> <p>2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi;</p> <p>3) Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi</p> <p>4) Pengembangan layanan publik berbasis IT.</p>

Sumber: Laporan Antara KHLS RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2013-2018

RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.6.**  
**Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bappelitbangda Kota Bekasi Ditinjau dari RTRW dan KLHS**

No.	RTRW dan KLHS	Permasalahan Bappelitbangda	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Penyusunan Raperda RTRW 2011-2031 Revisi	RTRW 2011-2031 Revisi belum sepenuhnya dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan lainnya karena masih dalam penyusunan.	RTRW 2011-2031 Revisi belum ditetapkan melalui Perda sehingga belum dapat disosialisasikan	RTRW 2011-2031 Revisi menjadi harapan perbaikan penataan ruang Kota Bekasi sesuai dengan kebutuhan.
2.	Penyelenggaraan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang)	Hasil rekomendasi pemanfaatan ruang belum optimal ditindaklanjuti	Belum adanya mekanisme/ pedoman monev tindaklanjut rekomendasi pemanfaatan ruang	RTRW 2011-2031 Revisi
3.	Penyusunan KLHS-RPJMD Kota Bekasi	Target Indikator SDGs belum diisi oleh setiap OPD	Belum disusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelaksanaan SDGs/TPB	Disusunnya KLHS RPJMD Kota Bekasi

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil FGD dan serangkaian metode dari identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah atau hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra periode tahun sebelumnya.

Berikut adalah isu-isu strategis terkait perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan di Kota Bekasi.

#### **1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah**

Kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi isu strategis pertama karena berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, antara lain: (1) belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi; serta (2) belum optimalnya pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi; (3) belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan, melalui penyelesaian permasalahan tersebut agar menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dan bermanfaat.

#### **2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas analisis data untuk perencanaan pembangunan**

Ketersediaan dan kualitas analisis data perencanaan di Bappelitbangda Kota Bekasi menjadi isu penting karena masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain: (1) masih belum tersedianya data perencanaan sektoral yang lengkap, terbaru dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan; (2) belum

terjaminnya kualitas data yang tersedia; serta (3) belum optimalnya pemanfaatan dan analisis data untuk perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, kualitas data dan pemanfaatan atau analisisnya perlu terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

3. Peningkatan kualitas mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dipengaruhi oleh mekanisme dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah baik dari metode pengajuan usulan dari mulai tingkat masyarakat, kelurahan, kecamatan, Perangkat Daerah, sampai dengan tingkat kota. Di samping itu, kualitas perencanaan Perangkat Daerah masih belum optimal dan belum sepenuhnya selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.

4. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur perencanaan

Di samping ketersediaan data dan mekanisme perencanaan yang berpengaruh dalam menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, isu penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur penyusun perencanaan.

Kapasitas sumberdaya aparatur yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan memiliki peran penting dalam menghasilkan rencana pembangunan daerah Kota Bekasi yang berkualitas. Namun, aparatur perencana baik di Bappelitbangda Kota Bekasi maupun di Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi untuk menyusun perencanaan pembangunan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan secara baik dan akuntabel, masih terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, kualitas aparatur perencana baik di Bappelitbangda Kota Bekasi maupun di Perangkat Daerah perlu terus ditingkatkan kapasitasnya.

5. Peningkatan kualitas penelitian di berbagai bidang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi misi pembangunan daerah.

Bappelitbangda harus menjadi perangkat daerah yang mampu memberikan pertimbangan teknis bagi Perangkat Daerah lain dalam rangka mendukung penetapan suatu kebijakan daerah yang

berbasis kelitbang. Untuk itu, Bappelitbangda harus membuat dan mendorong penelitian di berbagai bidang pembangunan baik yang dilakukan oleh internal Bappelitbangda maupun dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi, serta didukung oleh Sistem Informasi hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang mudah diakses untuk semua kalangan.

6. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur peneliti

Dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas diperlukan sdm aparatur peneliti yang kompeten. Untuk itu, baik dari kuantitas maupun kualitas aparatur peneliti di Bappelitbangda perlu ditingkatkan.

7. Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 386 s.d. 390, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Litbang Daerah sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya saing daerah.

8. Komitmen penganggaran dan kerjasama untuk penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK harus ditingkatkan dan menjadi prioritas.

Pentingnya penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah menuntut komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan. Namun, adanya keterbatasan anggaran sehingga penelitian dan penerapan IPTEK terbatas tidak semua di berbagai bidang dapat didanai, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga masyarakat baik dalam penelitian maupun pengembangan IPTEK dan Inovasi.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Isu strategis pembangunan pada aspek perencanaan adalah peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan tugas pokok Bappelitbangda, Bappelitbangda mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu Misi yang pertama **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”** dengan Tujuan **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”**, dan Sasaran dari Tujuan Misi I tersebut yaitu **“Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah”**.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Bekasi tersebut, serta menangani permasalahan dan isu strategis perencanaan pembangunan, maka Bappelitbangda merumuskan 3 (tiga) Tujuan sebagai berikut.

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Indikator tujuan 1 : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Tujuan 2 : Meningkatkan penelitian, pengembangan pembangunan daerah yang inovatif dan berbasis Iptek

Indikator ke-1 : Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan tujuan 2

- Indikator ke-2 : Jumlah Iptek dan inovasi daerah yang mendapat tujuan 2 predikat tingkat nasional
3. Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Bappelitbangda
- Indikator tujuan 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda

Bappelitbangda merumuskan Tujuan 1 “Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah” dengan indikator “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” yang diukur dari keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan

Dalam rangka mencapai Tujuan 1 tersebut, dirumuskan Sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Bappelitbangda maka Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan 1 adalah:

- Sasaran 1 : Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan penganggaran dan pelaksanaan
- Indikator : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sasaran 1

Adapun sasaran yang ingin dicapai Bappelitbangda Kota Bekasi dalam rangka mendukung Tujuan 2 adalah sebagai berikut:

- Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta Iptek dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan
- Indikator 1 : Persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan
- Sasaran 2
- Indikator 2 : Jumlah Iptek dan inovasi daerah yang mendapat Sasaran 2 predikat tingkat nasional

Adapun sasaran yang ingin dicapai Bappelitbangda Kota Bekasi dalam rangka mendukung Tujuan 3 adalah sebagai berikut:

Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda  
 Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  
 Sasaran 3 Bappelitbangda

Target Tujuan dan Sasaran jangka menengah Bappelitbangda seperti tergambar pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kota Bekasi**  
**Tahun 2019-2023**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan penganggaran dan pelaksanaan	1.1.2. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan Penelitian, pengembangan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Berbasis Iptek		3. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	10%	10%	20%	40%	60%
			4. Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapat predikat tingkat nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	2 Predikat Tingkat Nasional
		1.2. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta Iptek dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan	1.2.1. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	10%	10%	20%	40%	60%
			1.2.2. Jumlah Iptek dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	2 Predikat Tingkat Nasional

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			tingkat nasional					
3.	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Bappelitbangda		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	81,47	83,91	86,43	88,16	89,92
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	81,47	83,91	86,43	88,16	89,92

Adapun formulasi perhitungan Indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.2.**

**Formulasi Perhitungan IKU Bappelitbangda Kota Bekasi**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan penganggaran dan pelaksanaan	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	1	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Permendagri No.86 Tahun 2017, bahwa harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.	<b>Menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan tahapan a s.d. e sebagai berikut:</b>	Kepala Bappelitbangda	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan 2. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3. Dokumen Penganggaran Pembangunan Daerah 4. Dokumen Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan
				2	Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional  Pasal 3 Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah: a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran	<b>a. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD:</b>  = (Jumlah program dalam RKPD) : (Jumlah program dalam RPJMD) x 100%	Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (AP4EP)	1. RKPD Kota Bekasi 2. RPJMD Kota Bekasi
						<b>b. Menghitung kesesuaian antara RENJA dengan RKPD</b>  = (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RENJA) : (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD) x 100%	1. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2. Bidang Ekonomi dan SDA; 3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 4. Bidang AP4EP.	1. Renja Perangkat Daerah dan BA Desk Renja 2. RKPD Kota Bekasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
				berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja.  b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan.	c. <b>Menghitung kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD =</b>  = (Jumlah program dalam RENSTRA) : (Jumlah program dalam RPJMD) x 100%	1. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2. Bidang Ekonomi dan SDA; 3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 4. Bidang AP4EP.	1. Renstra Perangkat Daerah 2. RPJMD Kota Bekasi
					d. <b>Menghitung kesesuaian antara APBD dengan RKPD</b>  = (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD) : (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD) x 100%	Bidang AP4EP	1. RKPD Kota Bekasi 2. APBD Kota Bekasi
					e. <b>Menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dari hasil a s.d. d</b>  = (25%*Hasil a + 25%*Hasil b + 25%*Hasil c + 25%*Hasil d)	Sekretariat	
2.	Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan	2. Persentase hasil kelibangan yang dimanfaatkan	Persen (%)	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 219 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Litbang Daerah sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan	= (Jumlah hasil kelibangan yang dimanfaatkan) : (Jumlah total hasil kelibangan) x 100%	Kepala Bappelitbangda	Hasil penelitian/ kelibangan yang dilakukan oleh Bappelitbangda maupun dikerjasamakan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
				pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang litbang agar pelaksanaan kelitbangan lebih terkonsentrasi dan berdayaguna.			
		3. Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional	Predikat	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 386 s.d. 390, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Litbang Daerah sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya saing daerah.	Penghargaan/predikat tingkat nasional atas IPTEK dan inovasi yang dilombakan dihitung/dijumlahkan.	Kepala Bappelitbangda	Pengumuman atas hasil perlombaan hasil IPTEK dan inovasi daerah Tingkat Nasional
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda	4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP yaitu (1) perencanaan kinerja (bobot 30%), (2) pengukuran kinerja (bobot 30%), (3) pelaporan kinerja (bobot 15%), dan (4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%).	Kepala Bappelitbangda	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Kota Bekasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
				Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu predikat dan nilai.	Hasil evaluasi AKIP dinyatakan dalam predikat: 1. AA dengan nilai >90-100; 2. A dengan nilai >80-90; 3. BB dengan nilai >70-80; 4. B dengan nilai >60-70; 5. CC dengan nilai >50-60); 6. C dengan nilai >30-50); dan 7. D dengan nilai 0-30.		

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi Bappelitbangda Kota Bekasi**

Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD), langkah berikutnya adalah menetapkan strategi dan kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanannya. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah;
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Kota Bekasi yang akan diambil, dapat dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Adapun hasil

analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Bappelitbangda Kota Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan/ *Strenght* (S)

- a. Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Bappelitbangda setiap tahunnya melalui diklat perencanaan;
- b. Alokasi dana APBD untuk membiayai kegiatan organisasi tersedia dengan jumlah relatif mencukupi;
- c. Terdapatnya dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan.

2. Kelemahan/ *Weakness* (W)

- a. Koordinasi antar bidang belum optimal;
- b. Belum kompetennya Sumber Daya Aparatur dalam menunjang kinerja Bappelitbangda;
- c. Belum memadai dan akuratnya sistem informasi perencanaan;
- d. Fasilitas dan sarana/prasarana pendukung belum memadai;
- e. SOP yang belum terlaksana;
- f. Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal.

3. Peluang/ *Opportunity* (O)

- a. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Bappelitbangda dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- b. Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur perencana cukup tersedia;
- c. Peraturan Perundangan yang kondusif;
- d. Komunikasi yang intensif dan kondusif dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan;
- e. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;
- f. Menjalin kerjasama dengan berbagai daerah;

4. Ancaman/ *Thread* (T)

- a. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;

- b. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, *stakeholders*, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;
- c. Adanya perbedaan perspektif dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga keduanya belum bisa berjalan dengan sinkron dan integratif;
- d. Pemahaman dan nilai serap terhadap penguasaan teknologi informasi masih kurang;
- e. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi, kemudian dilakukan pemilihan faktor-faktor yang memiliki nilai strategis, yang akan dipergunakan dalam analisis SWOT. Hasil inventarisasi tersebut ditampilkan dalam Tabel 1. sebagai berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Penilaian Analisa SWOT Bappelitbangda Kota Bekasi**

Analisa Lingkungan Internal (*Strenght & Weakness*)

Kekuatan (Strenght)	No.	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;	3
	2.	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Bappelitbangda setiap tahunnya melalui diklat perencanaan;	2
	3.	Alokasi dana APBD untuk membiayai kegiatan organisasi tersedia dengan jumlah relatif mencukupi;	3
	4.	Terdapatnya dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan masukkan dalam mengambil kebijakan;	3
<b>TOTAL</b>			<b>11</b>

Kelemahan (Weakness)	No.	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Koordinasi antar bidang belum optimal;	3
	2.	Belum kompetennya Sumber Daya Aparatur dalam menunjang kinerja Bappelitbangda;	3
	3.	Belum memadai dan akuratnya sistem informasi perencanaan;	2
	4.	Fasilitas dan sarana/prasarana pendukung belum memadai;	2
	5.	SOP yang belum terlaksana;	3
	6.	Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal.	3
<b>TOTAL</b>			<b>16</b>

Analisa Lingkungan Eksternal (*Opportunity & Threats*)

Peluang (Opportunity)	No.	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Bappelitbangda dalam melaksanakan pembangunan daerah;	3
	2.	Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur perencana cukup tersedia;	2
	3.	Peraturan Perundangan yang kondusif;	3
	4.	Komunikasi yang intensif dan kondusif dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan;	3
	5.	Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;	2
	6.	Menjalin kerjasama dengan berbagai daerah;	3
		<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

Tantangan (Threat)	No.	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;	3
	2.	Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;	3
	3.	Adanya perbedaan perspektif dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga keduanya belum bisa berjalan dengan sinkron dan integratif;	3
	4.	Pemahaman dan nilai serap terhadap penguasaan teknologi informasi masih kurang;	2
	5.	Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.	3
	<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	

Skor diukur dari Skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Berdasarkan Tabel Penilaian Analisa SWOT di atas, maka peluang dan tantangan sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat dituangkan dalam bentuk matriks SWOT.

**Tabel 5.2.**  
**Formulasi Strategi SWOT**

	<b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b>	<b>TANTANGAN (THREATS)</b>
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan dari Instansi pembina perencanaan (Bappenas, Dirjen Bangda dan Bappeda Provinsi);</li> <li>2. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;</li> <li>3. Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih belum diperbaharui beberapa peraturan daerah mengenai perencanaan;</li> <li>2. Belum tercapainya target kesesuaian antar dokumen perencanaan;</li> <li>3. Lemahnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>4. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan;</li> <li>5. Sistem informasi yang ada belum terkelola dengan baik;</li> <li>6. Inkosistensi perencanaan pembangunan daerah akibat adanya perubahan kebijakan nasional maupun provinsi.</li> </ol>
<b>FAKTOR INTERNAL</b>		
<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	S-O	W-O
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Kepala Daerah terhadap tugas dan fungsi Bappelitbangda;</li> <li>2. Upaya penguatan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem;</li> <li>3. Sudah adanya aparatur yang memiliki sertifikasi fungsional perencana, fungsional peneliti, fungsional arsiparis dan fungsional statistisi;</li> <li>4. Alokasi anggaran yang memadai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran untuk mengoptimalkan program prioritas;</li> <li>2. Memanfaatkan kemampuan SDM untuk melakukan perencanaan dan penganggaran melalui peningkatan sertifikasi fungsional ke jenjang yang lebih tinggi;</li> <li>2. Pengembangan teknologi informasi perencanaan yang terintegrasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan koordinasi perencanaan daerah lintas sektor;</li> <li>2. Mengoptimalkan teknologi informasi dalam memenuhi data dan informasi dasar pembangunan;</li> <li>3. Meningkatkan penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pembangunan yang tepat dan akurat;</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana.</li> </ol>

<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>	S-T	W-T
1. Belum terhimpunnya data perencanaan dari seluruh sektor; 2. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 3. Belum meratanya kompetensi aparatur perencana pada Bappelitbangda; 4. Masih rendahnya kemampuan SDM perencana, peneliti, arsiparis dan statistisi dalam analisa perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; 5. Belum dimaksimalkan SOP sebagai dasar pijakan perencanaan.	1. Memperkuat koordinasi perencanaan demi terciptanya keterpaduan anatara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan; 2. Meningkatkan pelayanan informasi perencanaan pembangunan daerah; 3. Penerapan SOP pada tahap pelaksanaan	1. Mendorong peningkatan integrasi dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah; 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan maupun peraturan yang berkenaan dengan perencanaan; 3. Memperkuat setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan penerapan SOP.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dirumuskan berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebagai landasan tindak lanjut untuk merespons isu strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Strategi dalam Renstra Bappelitbangda adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda yang selaras dengan strategi daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi jangka menengah Bappelitbangda menunjukkan bagaimana cara Bappelitbangda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappelitbangda dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappelitbangda.

Strategi dalam Renstra Bappelitbangda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappelitbangda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappelitbangda.

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappelitbangda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, maka strategi Bappelitbangda antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam (ESDA);
- b. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah (IPW);
- c. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian bidang Pembangunan Masyarakat dan Manusia (PMM);
- d. Peningkatan kualitas analisis pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (AP4EP);
- e. Meningkatkan hasil kelitbang yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat; dan
- f. Menciptakan ekosistem inovasi melalui perumusan kebijakan inovasi.

## **5.2. Arah Kebijakan Bappelitbangda Kota Bekasi**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bappelitbangda Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka arah kebijakan Bappelitbangda adalah sebagai berikut ini:

**Tabel 5.3.**

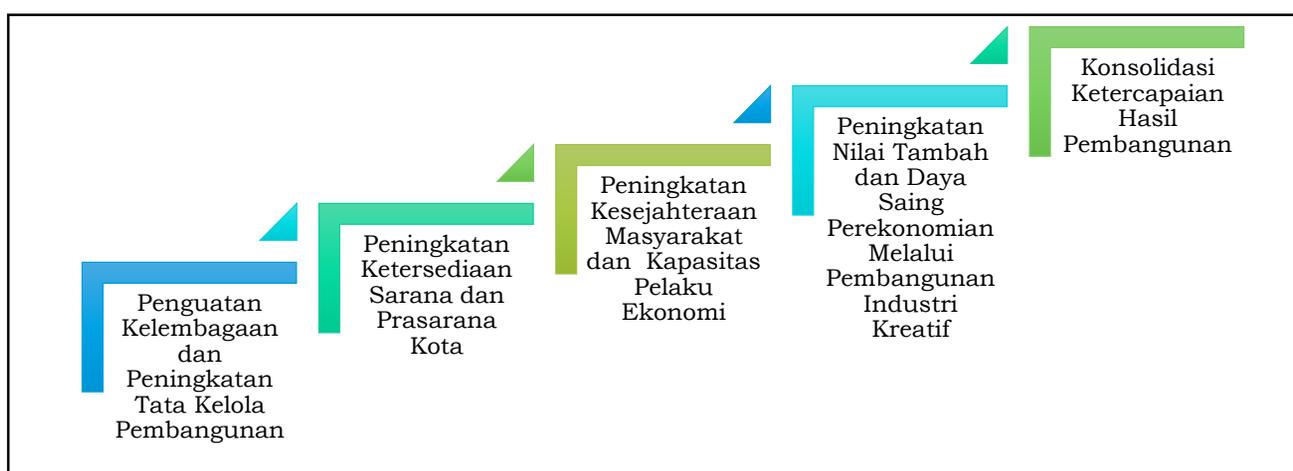
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda**

<b>Visi</b>		<b>: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan</b>					
<b>Misi I</b>		<b>: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik</b>					
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>				
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan penganggaran dan pelaksanaan	1. Peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah	a	Meningkatkan kualitas analisis pembangunan daerah			
			b	Meningkatkan pengendalian proses penyusunan dokumen pembangunan daerah			
			c	Mengembangkan sistem aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran			
				2. Peningkatan kualitas proses perencanaan bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam (ESDA)	a	Meningkatkan pengendalian penyusunan perencanaan lingkup bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam (ESDA)	
				3. Peningkatan kualitas proses perencanaan bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah (IPW)	a	Meningkatkan pengendalian penyusunan perencanaan lingkup bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah (IPW)	
				4. Peningkatan kualitas proses perencanaan bidang Pembagunan Masyarakat dan Manusia (PMM)	a	Meningkatkan pengendalian penyusunan perencanaan lingkup bidang Pembagunan Masyarakat dan Manusia (PMM)	
				5. Peningkatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	a	Mengembangkan sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan pengendalian dan evaluasi	
					b	Meningkatkan kualitas mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah	
		c	Meningkatkan kualitas penyediaan dan pemutakhiran data pembangunan daerah				
		6. Peningkatan pengendalian dan evaluasi perencanaan Bidang ESDA berdasarkan hasil evaluasi		Meningkatkan kualitas proses/mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan lingkup Bidang ESDA			
		7. Peningkatan pengendalian dan evaluasi perencanaan Bidang IPW berdasarkan hasil evaluasi		Meningkatkan kualitas proses/mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan lingkup Bidang IPW			
		8. Peningkatan pengendalian dan evaluasi perencanaan bidang Pembagunan Masyarakat dan		Meningkatkan kualitas proses/mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan			

Visi		: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan			
Misi I		: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				Manusia (PMM) berdasarkan hasil evaluasi	lingkup bidang Pembangunan Masyarakat dan Manusia (PMM)
2.	Meningkatkan Penelitian, pengembangan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Berbasis Iptek	2.	Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan	1. Meningkatkan hasil kelitbangan yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat	a. Pemanfaatan hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan untuk mendukung kebijakan pembangunan Kota Bekasi.
				2. Menciptakan ekosistem inovasi melalui perumusan kebijakan inovasi	b. Pemanfaatan hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan untuk mendukung kebijakan pembangunan Kota Bekasi.
					c. Pemanfaatan hasil kelitbangan bidang inovasi dan teknologi untuk mendukung kebijakan pembangunan Kota Bekasi.
					a. Peningkatan jumlah Inovasi Daerah.

Setelah dirumuskan strategi dan arah kebijakan, setiap arah kebijakan dirumuskan secara spesifik berdasarkan pentahapan pembangunan dalam RPJMD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang terbagi ke dalam lima periode waktu. Hasil perumusan pentahapan pembangunan Kota Bekasi tahun 2019-2023 sebagai berikut:

**Gambar 5.1**  
**Tahapan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2019-2023**



Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Berdasarkan pentahapan RPJMD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 tersebut, maka fokus prioritas Bappelitbangda Kota Bekasi sebagai dasar perumusan program dan kegiatan setiap tahunnya dari 2019 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.**

**Fokus Prioritas Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2019-2023**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Tema :</b>	<b>Tema :</b>	<b>Tema :</b>	<b>Tema :</b>	<b>Tema :</b>
Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Tata Kelola Pembangunan	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kota	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kapasitas Pelaku Ekonomi	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian Melalui Pembangunan Industri Kreatif	Konsolidasi Ketercapaian Hasil Pembangunan
<b>Fokus Prioritas :</b>	<b>Fokus Prioritas :</b>	<b>Fokus Prioritas :</b>	<b>Fokus Prioritas :</b>	<b>Fokus Prioritas :</b>
Penguatan Kapasitas Aparatur Bappelitbangda dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terutama aparatur Perencana.	Pengembangan Sistem Aplikasi Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang sudah terintegrasi juga dengan monitoring dan evaluasi.	Pemutakhiran kualitas data untuk perencanaan melalui berbagai kajian terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kapasitas pelaku ekonomi	Pemutakhiran kualitas data untuk perencanaan melalui berbagai kajian terkait ekonomi kreatif	Pengolahan data capaian hasil-hasil pembangunan melalui pemanfaatan Sistem Aplikasi Monitoring dan Evaluasi.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

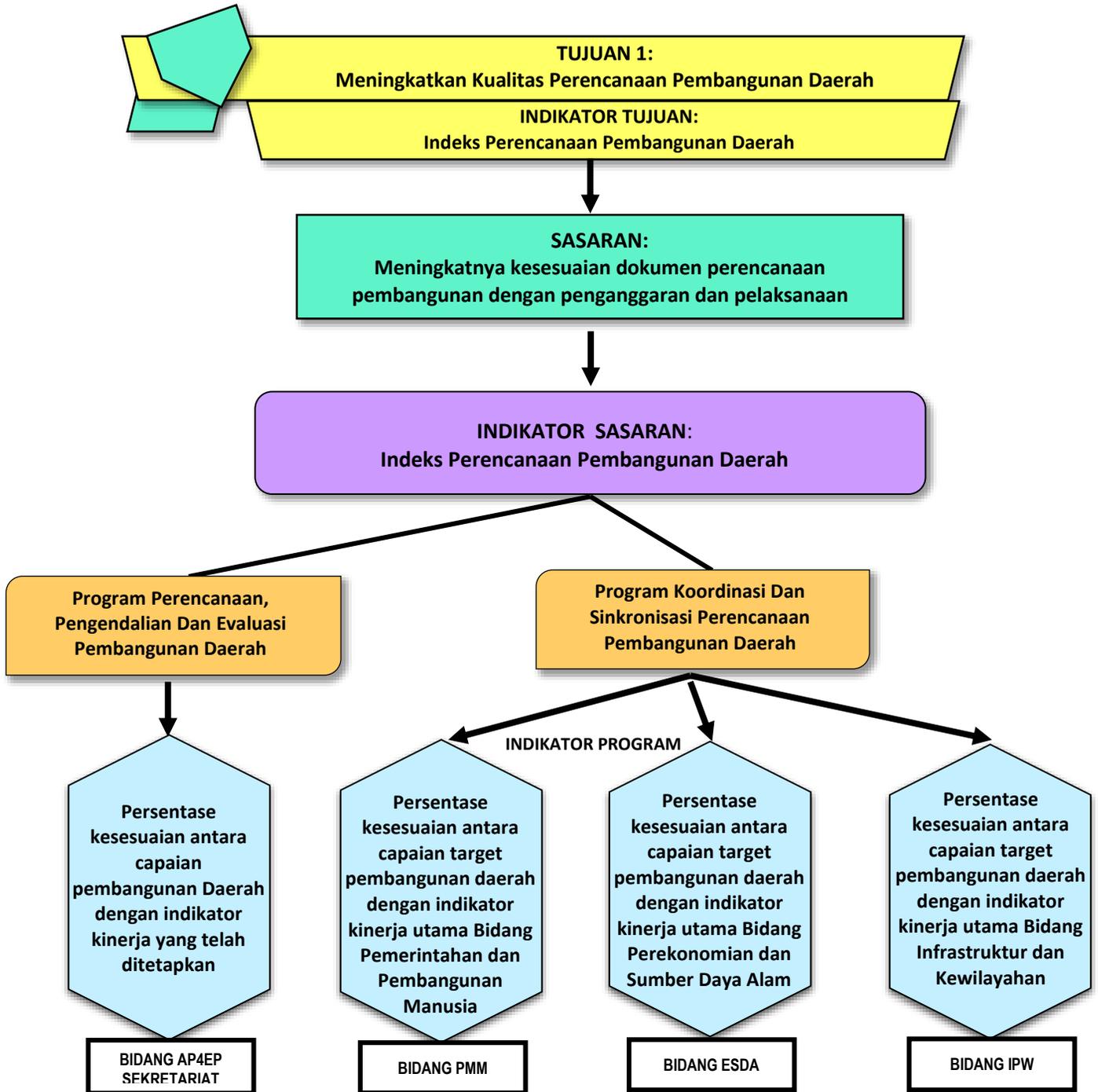
Program dan kegiatan pada Bappelitbangda Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018-2023 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Bappelitbangda yang pada akhirnya mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran, Misi dan Visi Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

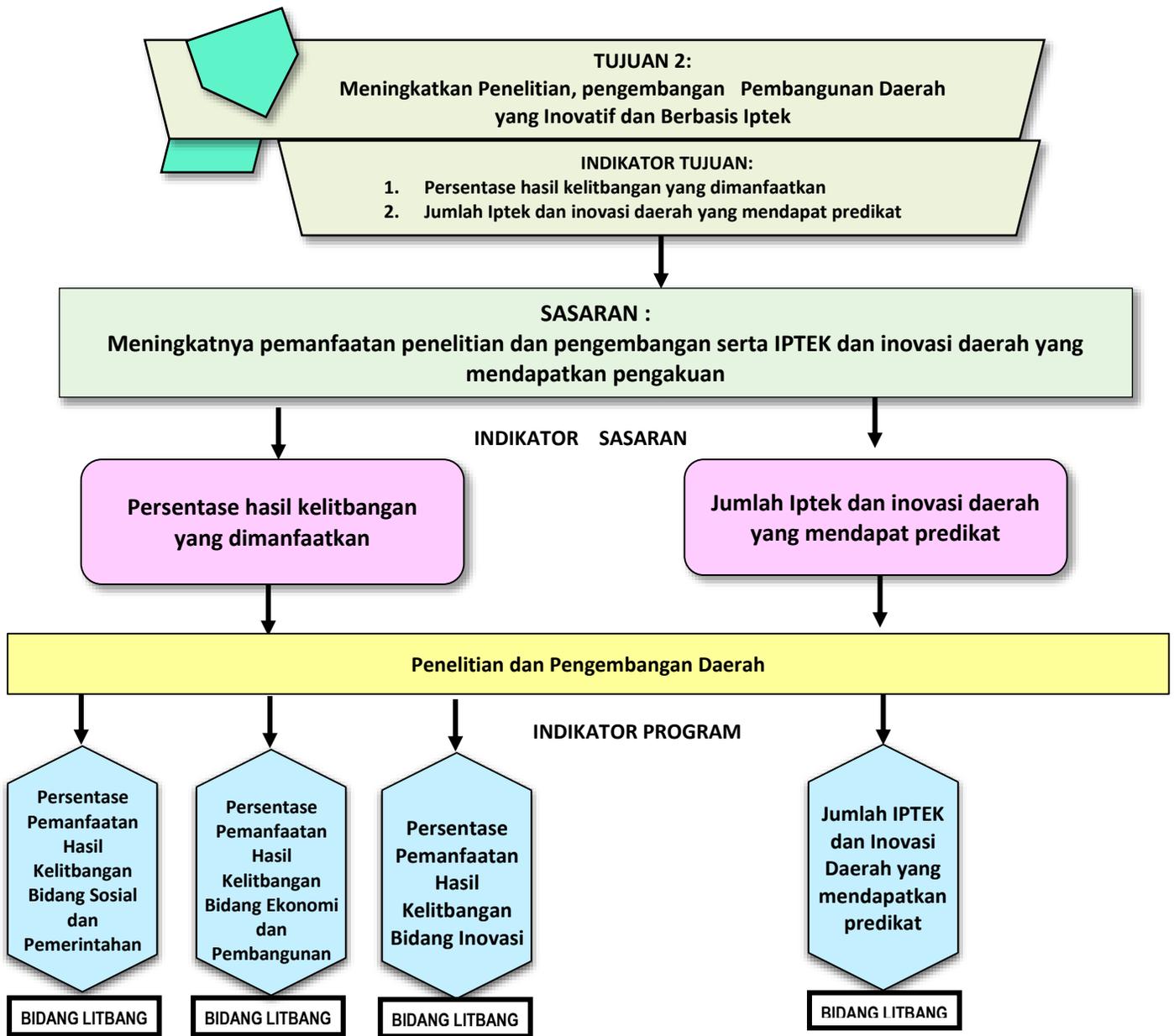
Bappelitbangda mendukung pencapaian Misi I yaitu “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”. Tujuan dari Misi I adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”, dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Adapun Sasaran dari Tujuan Misi I tersebut yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah” dengan indikator “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Berikut digambarkan alur pohon kinerja dari mulai Visi-Misi Kota Bekasi yang terkait Bappelitbangda sampai pada Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda.

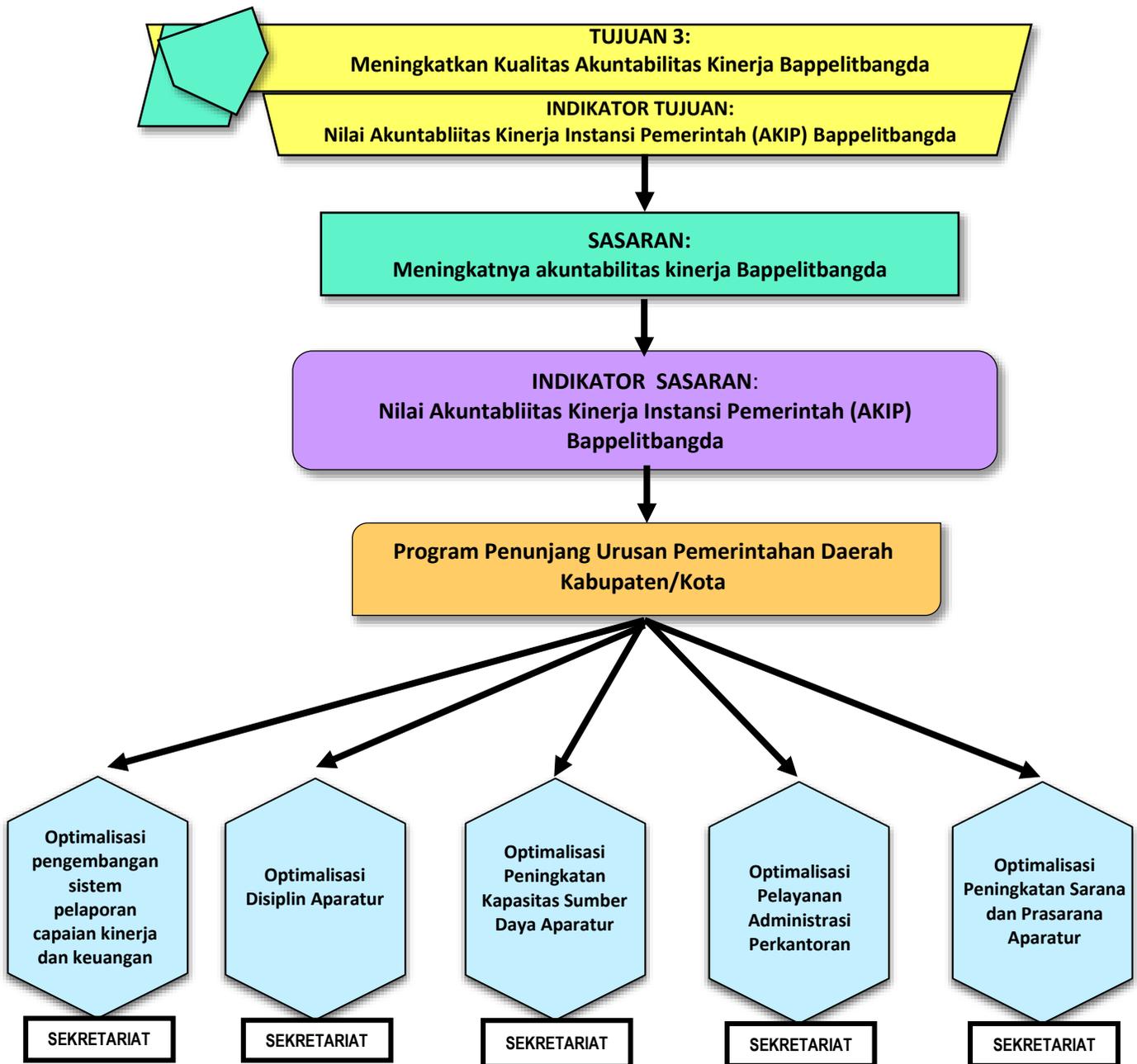
**Gambar 6.1.**  
**Pohon Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi**



**RENSTRA Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi  
Tahun 2018-2023**







Program dan kegiatan Bappelitbangda setiap tahunnya dari 2019 sampai dengan 2023 secara rinci ditunjukkan dalam dua tabel sebagai berikut. Untuk program dan kegiatan tahun 2019 dan 2020 telah dilaksanakan berdasarkan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023 sebelum perubahan pada Tabel 6.1 (nomenklatur lama), sedangkan Program dan Kegiatan ditambah Sub Kegiatan untuk Tahun 2021, 2022, dan 2023 berdasarkan Renstra Bappelitbangda Perubahan Tahun 2018-2023 ini pada Tabel 6.2 (nomenklatur baru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah) sebagai berikut.

Terdapat program yang berubah menyesuaikan perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023, yaitu:

1. “Program formulasi penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi”, diubah menjadi:
  - a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program terkait penunjang urusan yang awalnya terdiri dari 4 Program: (a) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, (b) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, (c) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan (d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, berubah menjadi “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”.

Di samping itu, kegiatan dan sub kegiatan juga menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut rencana program, kegiatan, dan pendanaan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 secara rinci baik yang masih menggunakan nomenklatur lama dan yang sudah menggunakan nomenklatur baru.

Dalam Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 merupakan program dan

kegiatan untuk tahun 2019 dan 2020 yang masih menggunakan nomenklatur lama dan telah dilaksanakan. Sementara dalam Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 merupakan hasil pemetaan dari program, kegiatan yang sebelumnya dari tahun 2019-2023 ke dalam nomenklatur yang baru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023**  
**(nomenklatur lama untuk tahun 2019 dan 2020)**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Sasaran (IKS), Program (outcome-IKP), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target			Rp (jutaan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Urusan Perencanaan							6.950		7.362	-	-	-	-	-	-	-	-		
1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah				IKT.1 Tingkat kualitas perencanaan pembangunan daerah	N/A	80%	6.950	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.1 Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen penganggaran			IKS 1.1.1 Tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen penganggaran	91%	100%	4.900	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		I	Program formulasi penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi	IKP.1 Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD		100%	850	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG ANALISIS PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PROGRAM, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN (AP4EP)	Kota Bekasi
		1	Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	Jumlah dokumen laporan hasil Musrenbang RPJMD	-	1 Dokumen Laporan Hasil Musrenbang RPJMD	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG AP4EP	Kota Bekasi
		2	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen laporan hasil Musrenbang RKPD	1 Dokumen Laporan Hasil Musrenbang RKPD	1 Dokumen Laporan Hasil Musrenbang RKPD	500	1 Dokumen Laporan Hasil Musrenbang RKPD	350	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (PERENCANAAN)	Kota Bekasi
				IKP.2 Persentase Kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan		100%	500	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM (ESDA)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Sasaran (IKS), Program (outcome-IKP), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target			Rp (jutaan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam															
		3	Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Laporan Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	1 dokumen Laporan Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	1 dokumen Laporan Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG ESDA	Kota Bekasi
		4	Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Laporan Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	1 dokumen Laporan Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	1 dokumen Laporan Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG ESDA	Kota Bekasi
		5	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-	-	-	1 dokumen Laporan Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	200	-	-	-	-	-	-	-	-		
				IKP.3 Persentase Kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang		100%	700	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (PMM)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Sasaran (IKS), Program (outcome-IKP), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				<b>Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>																
		6	Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Jumlah dokumen laporan hasil pendampingan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah lingkup bidang pembangunan manusia dan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PMM	Kota Bekasi
		7	Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil pendampingan penyusunan dan verifikasi rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2020 Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	350			-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PMM	Kota Bekasi
		8	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	-	-	-	1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PMM	Kota Bekasi
				<b>IKP.4 Persentase Kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembang an Wilayah</b>			<b>100%</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>BIDANG IPW</b>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Sasaran (IKS), Program (outcome-IKP), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		9	Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen laporan hasil pendampingan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG IPW	Kota Bekasi
		10	Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen laporan hasil pendampingan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG IPW	Kota Bekasi
		11	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	-	-	1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	300	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG IPW	Kota Bekasi
				<b>IKP.5 Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD</b>		<b>100%</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG AP4EP	
		12	Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPA-PPAS	Jumlah dokumen KUA/KUPA-PPAS	2 Dokumen (1 Dokumen Nota Kesepakatan KUA/KUPA PPAS TA 2019 dan 1 Dokumen Nota Kesepakatan KUA/KUPA PPAS 2018 Perubahan)	2 Dokumen (1 Dokumen Nota Kesepakatan KUA/KUPA PPAS TA 2019 dan 1 Dokumen Nota Kesepakatan KUA/KUPA PPAS 2019 Perubahan)	500	2 Dokumen (1 Dokumen Nota Kesepakatan KUA/KUPA PPAS TA 2020 dan 1 Dokumen Nota Kesepakatan KUA/KUPA PPAS 2020 Perubahan)	500	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG AP4EP	Kota Bekasi
				<b>IKP.6 Persentase Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan dengan RTRW</b>		<b>100%</b>	<b>250</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH (IPW)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Sasaran (IKS), Program (outcome-IKP), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target			Rp (jutaan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		13	Koordinasi dan Persetujuan Subtansi Perda RTRW Daerah	Jumlah Perda RTRW Kota Bekasi	N/A	1 Perda RTRW Kota Bekasi	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG IPW	Kota Bekasi
				<b>IKP.7 Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu dan Tepat Aturan</b>		<b>100%</b>	<b>1.600</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>BIDANG AP4EP</b>	
		14	Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Jumlah Raperda RPJMD	N/A	1 Raperda RPJMD TA 2018-2023	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG AP4EP	Kota Bekasi
		15	Review RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023	Jumlah dokumen Hasil Review RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		16	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah dokumen RKPD	2 Dokumen (RKPD Kota Bekasi TA.2019, 1 dokumen RKPD Perubahan Kota Bekasi TA.2018)	2 Dokumen (RKPD Kota Bekasi TA.2020, 1 dokumen RKPD Perubahan Kota Bekasi TA.2019)	300	2 Dokumen (RKPD Kota Bekasi TA.2021, 1 dokumen RKPD Perubahan Kota Bekasi TA.2020)	300	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG AP4EP	Kota Bekasi
		17	Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2005-2025	Jumlah Dokumen Review RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG AP4EP	Kota Bekasi
		18	Pengembangan Sistem Aplikasi Perencanaan dan Penggangan Pembangunan	Jumlah Sistem Aplikasi Perencanaan dan Penggangan Pembangunan	1 Sistem Aplikasi Perencanaan dan Penggangan Pembangunan	1 Sistem Aplikasi Perencanaan dan Penggangan Pembangunan	200	1 Sistem Aplikasi Perencanaan dan Penggangan Pembangunan	200	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG AP4EP	Kota Bekasi
		19	Penyajian Data dan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Website	Jumlah informasi (berita dan kajian perencanaan) yang dipublikasikan melalui website	N/A	144 informasi (content)	100	144 informasi (content)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Sasaran (IKS), Program (outcome-IKP), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		20	Rapat Kerja Bappeda	Jumlah aparatur yang mengikuti Rapat Kerja Bappeda	N/A	105 orang aparatur	500	105 orang aparatur	250	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (PERENCANAAN)	Kota Bekasi
	1.2 Meningkatnya kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan			1.1.2 Tingkat kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan	100%	60%	2.050	70%	4.812	-	-	-	-	-	-	-	-		
				IKP.8 Persentase kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan		100%	350	100%	350	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG AP4EP	
		21	Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan	Jumlah dokumen laporan evaluasi perencanaan dan kinerja pembangunan	18 Dokumen (12 Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan; 4 Dokumen Laporan Evaluasi RKPD Triwulanan; 1 Dokumen Laporan Evaluasi RKPD Tahunan; 1 Dokumen Laporan Dana Bantuan Tahun 2017)	18 Dokumen (12 Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan; 4 Dokumen Laporan Evaluasi RKPD Triwulanan; 1 Dokumen Laporan Evaluasi RKPD Tahunan; 1 Dokumen Laporan Dana Bantuan Tahun 2018)	350	18 Dokumen (12 Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan; 4 Dokumen Laporan Evaluasi RKPD Triwulanan; 1 Dokumen Laporan Evaluasi RKPD Tahunan; 1 Dokumen Laporan Dana Bantuan Tahun 2019)	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Bekasi
				IKP.9 Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan		100%	350	100%	1.662	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG AP4EP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Sasaran (IKS), Program (outcome-IKP), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target			Rp (jutaan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		22	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	Jumlah dokumen LKPJ	1 Dokumen LKPJ Tahun 2017	1 Dokumen LKPJ Tahun 2018	200	1 Dokumen LKPJ Tahun 2019	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Bekasi
		23	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Bersumber dari Bantuan Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Bersumber dari Bantuan Provinsi DKI Jakarta	N/A	-	-	1 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Bersumber dari Bantuan Provinsi DKI Jakarta	1.312	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG AP4EP	Kota Bekasi
		24	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen laporan hasil analisis data perencanaan pembangunan Kota Bekasi	1 Dokumen laporan hasil analisis data perencanaan pembangunan Kota Bekasi	1 Dokumen laporan hasil analisis data perencanaan pembangunan Kota Bekasi	150	1 Dokumen laporan hasil analisis data perencanaan pembangunan Kota Bekasi	150	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG AP4EP	Kota Bekasi
				<b>IKP.10 Persentase Ketersediaan Data/Dokumen Perencanaan Sektoral Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam</b>		<b>30%</b>	<b>600</b>	<b>40%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>BIDANG ESDA</b>	
		25	Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Indikator Ekonomi Makro	N/A	1 dokumen Hasil Analisa Indikator Ekonomi Makro	300	1 dokumen Hasil Analisa Indikator Ekonomi Makro	250	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG ESDA	Kota Bekasi
		26	Analisis Potensi Ekonomi Kota Bekasi sampai dengan Tahun 2023	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kota Bekasi sampai dengan Tahun 2023	N/A	-	-	1 Dokumen Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kota Bekasi sampai dengan Tahun 2023	300	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG ESDA	Kota Bekasi
		27	Baseline Survey Ekonomi Kreatif Kota Bekasi	Jumlah dokumen Baseline Survey dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bekasi	N/A	1 dokumen Baseline Survey dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bekasi	300	1 dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif	300	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG ESDA	Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Sasaran (IKS), Program (outcome-IKP), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		28	Penyusunan Tabel Input-Output Kota Bekasi	Jumlah dokumen Tabel Input-Output Kota Bekasi	N/A	-	-	1 dokumen Tabel I-O Kota Bekasi	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG ESDA	Kota Bekasi
		29	Penyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Kota Bekasi	Jumlah dokumen Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Kota Bekasi	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG ESDA	Kota Bekasi
		30	Kajian Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Kota Bekasi	Jumlah dokumen Kajian Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Kota Bekasi	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG ESDA	Kota Bekasi
		31	Kajian Pertanian Sektor Perkotaan	Jumlah dokumen Kajian Pertanian Sektor Perkotaan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG ESDA	Kota Bekasi
		32	Evaluasi Pencapaian Renja terhadap RENSTRA lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pencapaian Renja terhadap RENSTRA lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	N/A	-	-	1. Dokumen Laporan Evaluasi Pencapaian Renstra terhadap RPJMD lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG ESDA	Kota Bekasi
		33	Penyusunan Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI)	Jumlah Dokumen Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI)	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG ESDA	Kota Bekasi
				<b>IKP.11 Persentase Ketersediaan Data/Dokumen Perencanaan Sektoral Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>		<b>30%</b>	<b>150</b>	<b>40%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>BIDANG PMM</b>	
		34	Penyelenggaraan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Bekasi	Jumlah Dokumen LP2KD	1 Dokumen	1 Dokumen LP2KD Kota Bekasi	150	1 Dokumen LP2KD Kota Bekasi	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PMM	Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Sasaran (IKS), Program (outcome-IKP), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		35	Evaluasi Pencapaian Renja terhadap Renstra lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pencapaian Renja terhadap Renstra lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	N/A	-	-	1 Dokumen Laporan Evaluasi Pencapaian Renja terhadap Renstra lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	300	-	-	-	-	-	-	-	-		
		36	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDGs) Kota Bekasi	Jumlah dokumen RAD SDGs Kota Bekasi	N/A	-	-	1 Dokumen RAD SDGs Kota Bekasi	200	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PMM	Kota Bekasi
		37	Evaluasi Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDGs) Kota Bekasi	Jumlah dokumen evaluasi RAD SDGs Kota Bekasi	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PMM	Kota Bekasi
				<b>IKP.12 Persentase Ketersediaan Data/Dokumen Perencanaan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>		<b>30%</b>	<b>600</b>	<b>40%</b>										<b>BIDANG IPW</b>	
		38	Penyusunan RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan)	Jumlah dokumen RP2KPKP	N/A	1 Dokumen RP2KPKP	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG IPW	Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Sasaran (IKS), Program (outcome-IKP), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		39	Penyelenggaraan Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) dan PKP (Permukiman dan Kawasan Permukiman)	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Pokja AMPL dan PKP	2 Dokumen (dari Pokja AMPL dan PKP)	2 Dokumen (dari Pokja AMPL dan PKP)	200	2 Dokumen (dari Pokja AMPL dan PKP)	200	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG IPW	Kota Bekasi
		40	Review Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Jumlah Dokumen Review RISPAM	N/A	-	-	1 Dokumen Hasil Review RISPAM	350	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG IPW	Kota Bekasi
		41	Evaluasi Pencapaian Renja terhadap RENSTRA lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pencapaian Renja terhadap RENSTRA lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	N/A	-	-	1 Dokumen Laporan Evaluasi Pencapaian Renstra terhadap RPJMD lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	200	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG IPW	Kota Bekasi
		42	Penyelenggaraan Dewan Kota Cerdas Bekasi	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Dewan Kota Cerdas Kota Bekasi	1 Dokumen Laporan Penyelenggaraan Dewan Kota Cerdas Kota Bekasi	1 Dokumen Laporan Penyelenggaraan Dewan Kota Cerdas Kota Bekasi	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (PERENCANAAN)	Kota Bekasi
Urusan Penelitian dan Pengembangan							650		600	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 Meningkatkan Penelitian, pengembangan pembangunan daerah yang inovatif dan berbasis IPTEK				IKT.1. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	N/A	10%	650	10%	600	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.1. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan			IKS. 2.1.1. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	N/A	10%	650	10%	600	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Sasaran (IKS), Program (outcome-IKP), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		II	Program Kelitbangan Utama dan Pendukung	IKP.1 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	N/A	10%	650	10%	600	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)	Kota Bekasi
				IKP.2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan pembangunan	N/A	10%		10%		-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG LITBANG	Kota Bekasi
				IKP.3 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Inovasi dan teknologi	N/A	10%		10%		-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG LITBANG	Kota Bekasi
		1	Kajian Pembangunan Zona Bekasi Kreatif	Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan Zona Bekasi Kreatif yang telah dinilai oleh Tim Pengendali Mutu (TPM)	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Kota Bekasi
		2	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kota Bekasi yang telah dinilai oleh Tim Pengendali Mutu (TPM)	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG LITBANG	Kota Bekasi
		3	Kajian Pengembangan Komunitas berorientasi Ekonomi Kreatif (7)	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Komunitas berorientasi Ekonomi Kreatif yang telah dinilai oleh Tim Pengendali Mutu (TPM)	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG LITBANG	Kota Bekasi
		4	Kajian Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Memperkuat	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Memperkuat Struktur Ekonomi Kota Bekasi yang telah dinilai	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG LITBANG	Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Sasaran (IKS), Program (outcome-IKP), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Struktur Ekonomi Kota Bekasi	oleh Tim Pengendali Mutu (TPM)																
		5	Penelitian Mandiri yang dilakukan oleh Fungsional Balitbangda Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penelitian Mandiri yang dilakukan oleh Fungsional Balitbangda Kota Bekasi yang telah dinilai oleh Tim Pengendali Mutu (TPM)	N/A	-	-	4 dokumen	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG LITBANG	Kota Bekasi
		6	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Techno Park	Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan Techno Park yang telah dinilai oleh Tim Pengendali Mutu (TPM)	N/A	-	-	1 dokumen	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG LITBANG	Kota Bekasi
		7	Pengembangan Posyantek dan Penyelenggaraan Gelar TTG	Jumlah Peserta Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	N/A	3 Laporan (TTG Tk Kota, Tk Provinsi, Tk Nasional)	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG LITBANG	Kota Bekasi
		8	Forum Sosialisasi dan atau Diseminasi Kelitbangan	Jumlah even Sosialisasi dan atau Diseminasi Kelitbangan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG LITBANG	Kota Bekasi
		9	Penunjang Majelis Pertimbangan	Jumlah dokumen hasil Kegiatan FGD	N/A	2 dokumen	100	1 dokumen	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG LITBANG	Kota Bekasi
				<b>IKT.2. Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat</b>	N/A	<b>1 Predikat</b>	-	<b>1 Predikat</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.2. Meningkatkan IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan			<b>IKS. 2.2.1. Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat</b>	N/A	<b>1 Predikat</b>	-	<b>1 Predikat</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				<b>IKP.2 Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat</b>	N/A	<b>1 Predikat</b>	-	<b>1 Predikat</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG LITBANG	Kota Bekasi
		10	Lomba Inovasi Daerah	Jumlah even Lomba Inovasi Daerah	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG LITBANG	Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Sasaran (IKS), Program (outcome-IKP), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target			Rp (jutaan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Penunjang Urusan							3.927		5.226										
		III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	30	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	Kota Bekasi
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dokumen perjanjian kinerja Perangkat Daerah, dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen:- 1 dokumen Renja Tahun 2019- 1 dokumen perjanjian kinerja- 1 dokumen LAKIP	4 dokumen:- 1 dokumen Renstra Tahun 2018-2023- 1 dokumen Renja Tahun 2020- 1 dokumen perjanjian kinerja- 1 dokumen LAKIP	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (PERENCANAAN)	Kota Bekasi
		2	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	3 jenis dokumen laporan:- laporan keuangan bulanan - laporan keuangan semesteran- laporan keuangan tahunan	3 jenis dokumen laporan:- laporan keuangan bulanan - laporan keuangan semesteran- laporan keuangan tahunan	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (PERENCANAAN)	Kota Bekasi
		IV	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.637	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	Kota Bekasi
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	200	100%	60	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi
		2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	65 jenis	65 jenis	250	70 jenis	250	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi
		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	20 jenis	20 jenis	170	20 jenis	170	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media cetak sebagai sarana informasi	10 jenis surat kabar	10 jenis surat kabar	70	10 jenis surat kabar	70	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Sasaran (IKS), Program (outcome-IKP), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase pemenuhan atas makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	100%	100%	60	100%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi
		6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	480 kali	480 kali	700	480 kali	700	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi
		7	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran	27 orang	27 orang	2.137	30 orang	3.341	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi
		8	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	50	1 dokumen laporan	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi
		9	Penataan Arsip	Persentase arsip in aktif	100%	-	-	100%	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi
		V	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>240</b>	<b>100%</b>	<b>415</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>Kota Bekasi</b>
		1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit Peralatan Gedung Kantor		-	-	27 unit	100	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi
		2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Kendaraan Dinas/Operasional	38 unit	38 unit	240	38 unit	240	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi
		3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit Peralatan Gedung Kantor	55 unit	55 unit	75	55 unit	75	-	-	-	-	-	-	-	-		
		VI	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>Kota Bekasi</b>
		1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	5 orang	20	10 orang	20	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (IKT), Sasaran (IKS), Program (outcome-IKP), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		VII	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	Kota Bekasi
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi
		2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi
		3	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian olahraga dan perlengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT (UMPEG)	Kota Bekasi
<b>TOTAL</b>							11.527		13.188										

Tabel 6.2.

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2019-2023  
(nomenklatur baru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 untuk tahun 2021-2022 dan  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi  
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah)**

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												
											2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah								Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	100%	5.311.923.400	100%	5.349.406.930	100%	8.053.070.530	100%	5.323.935.000	100%	5.147.575.000	100%	29.185.910.860	
	1.1. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan penganggaran dan pelaksanaan							1.1.1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	100%	5.311.923.400	100%	5.349.406.930	100%	8.053.070.530	100%	5.323.935.000	100%	5.147.575.000	100%	29.185.910.860	
		5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	IKP.1	Persentase kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan	75%	4.146.980.000	75%	3.692.920.930	80%	3.653.071.530	90%	2.873.935.000	100%	3.640.510.000	100%	18.007.417.460	
		5	01	02	2,01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	2.296.980.000	6 Dokumen	1.400.000.000	5 Dokumen	1.299.999.200	6 Dokumen	1.670.000.000	6 Dokumen	3.000.000.000	9 Dokumen	7.766.979.200
		5	01	02	2,01	01		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	290.600.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	299.999.900	1 Dokumen	300.000.000	-	-	5 Dokumen	1.140.599.900
									2	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	540.000.000	1 Dokumen	540.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												
											2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Musrenbang RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	256.380.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	499.999.800	1 Dokumen	500.000.000	-	-	5 Dokumen	1.406.379.800	
								2	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Musrenbang RPJMD	NA	1 Dokumen	350.000.000						-	-				
								3	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Berita Acara	500.000.000	1 Berita Acara	500.000.000
		5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah dokumen RKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	499.999.500	-	-	-	-	10 Dokumen	2.019.999.500	
								2	Jumlah dokumen Raperda RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018- 2023	NA	1 Dokumen	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								3	Jumlah dokumen Hasil Review RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018- 2023	NA	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	0	-	-	-	-	-	2 Dokumen	200.000.000
								5	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bekasi Tahun 2023-2028	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	0
								6	Jumlah Dokumen KUA/KUPA-PPAS	NA	2 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-
								7	Jumlah Peserta Bimtek	NA	-	-	70 Orang	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								8	Jumlah Dokumen RPJPD	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								9	Jumlah Dokumen Proyeksi Indikator Makro	NA	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	870.000.000	-	-	-	-	-
								10	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	NA	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
								11	Jumlah Dokumen RKPD Tahun Anggaran 2023	NA	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
								12	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022	NA	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
								13	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	1.960.000.000	4 Dokumen	1.960.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											
											2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	130.000.000	2 Dokumen	550.000.000	2 Dokumen	181.210.000	1 Dokumen	240.510.000	9 Dokumen	1.441.720.000	
		5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Jumlah dokumen hasil analisis data perencanaan pembangunan Kota Bekasi	NA	-	-	-	-	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	151.210.000	-	-	3 Dokumen	501.210.000	
								2 Jumlah Aplikasi Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	600.000.000	1 Aplikasi	100.000.000	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	700.000.000	
								3 Jumlah Peserta Pelatihan SIPD	NA	-	-	-	-	100 orang	-	-	-	-	-	100 orang	-	
								4 Jumlah Peserta Pelatihan Aplikasi Perencanaan Pembangunan	NA	-	-	-	-	-	-	75 Orang	-	-	-	75 Orang	-	
								5 Jumlah Dokumen Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	240.510.000	1 Dokumen	240.510.000	
		5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 Jumlah Konten Pengembangan Website Data dan Informasi Pembangunan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	200.000.000	-	-	-	-	3 Unit	230.000.000	
								2 Jumlah laporan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	5 Dokumen	80.000.000	
								3 Jumlah Pemeliharaan Website Data dan Informasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	1 Website	30.000.000	-	-	-	-		
		5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Jumlah Jenis Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan	3 Dokumen	15 Dokumen	1.200.000.000	20 Dokumen	2.162.920.930	15 Dokumen	1.803.072.330	16 Dokumen	1.022.725.000	13 Laporan	400.000.000	9 Dokumen	6.138.718.260	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (KS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN													
										2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
							Perencanaan Pembangunan Daerah																
		5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan	13 Dokumen	13 Dokumen	350.000.000	13 Dokumen	200.000.000	13 Dokumen	1.803.072.330	13 Dokumen	1.022.725.000	-	-	39 Dokumen	3.375.797.330	
								2	Jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi e-monev	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	-	
								3	Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD 2018- 2023	NA			1 Dokumen	200.000.000	-		1 Dokumen	-	-	-	-	-	
								4	Jumlah Laporan Tahunan Kegiatan Bantuan Keuangan DKI 2020	NA	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	1.312.920.930	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	5 Dokumen	1.962.920.930
								5	Jumlah Laporan Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan Bersumber Dana Transfer TA 2020	NA	-	-	4 Laporan	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
								6	Jumlah Dokumen LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	5 Dokumen	400.000.000
								7	Jumlah Dokumen Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	NA	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	
								8	Jumlah Laporan Tahunan Kegiatan Bantuan Keuangan DKI 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	-	
								9	Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pengusulan Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Bulan	-	-	-	-	
								10	Jumlah Penataan Ruangan Bidang AP4EP Bappelitbangda	-	-	-	-	-	-	-	-	135 m2	-	-	-	-	
								11	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	100 Orang	-	-	-	-	
								12	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 Laporan	400.000.000	13 Laporan	400.000.000
		5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	IKP.1	Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah		75%	226.430.000	75%	40.000.000	80%	849.999.000	90%	600.000.000	100%	166.545.000	100%	1.882.974.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											
											2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	dengan indikator kinerja utama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia														
		5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Hasil Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	NA	1 Dokumen	226.430.000	1 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	849.999.000	3 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	166.545.000	20 Dokumen	1.882.974.000	
		5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	0
		5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkup pemerintahan	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	0
		5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil evaluasi pembangunan berbasis komunitas	NA	-	-	-	-	1 Dokumen	349.999.500	-	-	-	-	-	3 Dokumen	349.999.500
		5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil sinergitas perencanaan pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
											2019		2020		2021		2022				2023		
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	Jumlah Dokumen LP2KD	NA	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	3 Dokumen	150.000.000	
							Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Jumlah Dokumen Background Study Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	NA	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	-	-	1 Dokumen	300.000.000	
		5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diverifikasi	NA	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	1 Dokumen	100.000.000	
							Pembangunan Manusia	2	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	NA									27 Perangkat Daerah	116.545.000	27 Perangkat Daerah	116.545.000	
		5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	1	Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	200000000
							Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Sustainable Development Goals (SDGs)	NA							1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	
							Pembangunan Manusia	3	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	NA									27 Perangkat Daerah	50.000.000	27 Perangkat Daerah	50.000.000	
		5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan		Jumlah dokumen hasil sinergitas perencanaan pembangunan Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	NA	1 Dokumen	226.430.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	349.999.500	-	-	-	-	4 Dokumen	616.429.500	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												
											2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
								Daerah Bidang Pembangunan Manusia															
								IKP.2	Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		75%	356.063.400	75%	900.000.000	80%	600.000.000	90%	450.000.000	100%	90.520.000	100%	2.396.583.400	
		5	01	03	2,02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA dan Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6	2 Dokumen	356.063.400	3 Dokumen	900.000.000	3 Dokumen	600.000.000	10 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	90.520.000	15 Dokumen	2.396.583.400	
		5	01	03	2,02	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Jumlah dokumen hasil Penyelarasan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	NA	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	300.000.000
									2 Jumlah dokumen hasil analisis indikator ekonomi makro	1	1 Dokumen	245.677.400	-	-	1 Dokumen	300.000.000	-	-	-	-	-	3 Dokumen	545.677.400
									3 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan Kota Bekasi Tahun 2019-2023	NA	-	0	1 Dokumen	300.000.000	-	0	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000
									4 Jumlah Dokumen Background Study Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	NA	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000
		5	01	03	2,02	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang diverifikasi	NA	-	-	1 Dokumen	300.000.000	-	-	8 Dokumen	100.000.000	-	-	-	3 Dokumen	400.000.000

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
											2019		2020		2021		2022				2023			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
								Bidang Perekonomian	2	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	NA								8 Perangkat Daerah	50.095.000	8 Perangkat Daerah	50.095.000		
				5	01	03	2,02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	NA	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	2 Dokumen	100.000.000	
									Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	NA	-	-	-	-	-	-	8 Perangkat Daerah	40.425.000	8 Perangkat Daerah	40.425.000		
				5	01	03	2,02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah dokumen hasil sinergitas perencanaan pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1	1 Dokumen	110.386.000	-	-	1 Dokumen	300.000.000	-	-	-	-	2 Dokumen	410.386.000
										IKP.3	Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		75%	582.450.000	75%	716.486.000	80%	2.950.000.000	90%	1.400.000.000	100%	1.250.000.000	100%	6.898.936.000
				5	01	03	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	NA	3 Dokumen	582.450.000	2 Dokumen	716.486.000	5 Dokumen	2.950.000.000	13 Dokumen	1.400.000.000	4 Dokumen	1.250.000.000	18 Dokumen	6.898.936.000
				5	01	03	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Drainase se-Kota Bekasi	NA	-	-	-	-	1 Dokumen	2.400.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	2.400.000.000

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						2019		2020		2021		2022		2023		TARGET	PAGU (Rp)			
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	(17)	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
			Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Jumlah Peta Detail Rawan Banjir di Kota Bekasi	NA	-	-	-	-	1 Dokumen		-	-	-	-	1 Dokumen	0		
				3	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Rencana Induk Transportasi Kota Bekasi	NA	-	-	-	-	1 Dokumen		-	-	-	-	-	1 Dokumen	0	
				4	Jumlah dokumen hasil Penyelarasan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	NA	-	-	1 Dokumen	366.486.000	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	366.486.000	
				5	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	NA	-	-	1 Dokumen	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	350.000.000
				6	Jumlah Perda RTRW Daerah	NA	1 Perda	207.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Perda	207.100.000
				7	Jumlah Dokumen Background Study Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	NA	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1.000.000.000				1 Dokumen	1.000.000.000	
				8	Jumlah Dokumen Review Rencana Induk Sistem Air Limbah Domestik (RISPAL) Kota Bekasi	NA	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen			-	-	-	1 Dokumen	0
				9	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Bekasi	NA	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen			-	-	-	1 Dokumen	0
				10	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	700.000.000		2 Dokumen	700.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)							PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (KS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN													
												2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
												TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)							(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
				5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang diverifikasi	3	-	-	-	-	-	-	9 Dokumen	100.000.000	-	-	1 Dokumen	100.000.000	
									Bidang Infrastruktur	2	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	NA									9 Perangkat Daerah	200.000.000	9 Perangkat Daerah	200.000.000	
				5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	NA	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	-	-	1 Dokumen	300.000.000	
									Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 Perangkat Daerah	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000
				5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah dokumen hasil sinergitas perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1	1 Dokumen	114.250.000	-	-	1 Dokumen	300.000.000	-	-	-	-	-	2 Dokumen	414.250.000
				5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	1	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah AMS (Air Minum dan Sanitasi)	1	-	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	
										2	Junmlah Dokumen RP2KPKP	1	1 Dokumen	261.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	261.100.000

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																	
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA							
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
2	Meningkatkan Penelitian, pengembangan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Berbasis Iptek							1.	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan		10%	200.000.000	10%	300.000.000	10%	800.000.000	40%	575.000.000	10%	999.613.000	60%	2.374.613.000	
								2.	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapat predikat		1 Predikat	300.000.000	1 Predikat	750.000.000	1 Predikat	449.999.900	1 Predikat	450.000.000	2 Predikat	329.408.800	6 Predikat	1.229.408.700	
	2.1. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan							IKS.1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan		10%	200.000.000	10%	300.000.000	20%	800.000.000	40%	575.000.000	60%	999.613.000	60%	2.374.613.000	
IKS.2								Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapat predikat		1 Predikat	300.000.000	1 Predikat	750.000.000	1 Predikat	449.999.900	1 Predikat	450.000.000	2 Predikat	329.408.800	6 Predikat	1.229.408.700		
		5	05	02				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	IKP.1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	14%	10%	100.000.000	10%	100.000.000	20%	800.000.000	40%	400.000.000	60%	500.000.000	60%	1.900.000.000
		5	05	02	2,01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	NA	1 Dokumen	100.000.000	-	0	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	1.050.000.000
		5	05	02	2,01	03		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	1	Jumlah Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK)	NA	1 Dokumen	100.000.000	-	-	1 Dokumen	350.000.000	-	-	-	-	3 Dokumen	450.000.000
								Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2	Jumlah Dokumen Policy Paper	NA	-	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	3 Dokumen	200.000.000
									3	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000
		5	05	02	2,01			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Aplikasi Data Kelitbangan	NA	-	-	-	-	1 Aplikasi	150.000.000	-	-	-	-	1 Aplikasi	150.000.000
		5	05	02	2,02			Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial		Jumlah Dokumen Penelitian Dan Pengembangan	NA	-	-	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	6 Dokumen	850.000.000

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (KS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
							Dan Kependudukan															
		5	05	02	2,02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	Jumlah Dokumen Penelitian Mandiri	NA	-	-	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	200.000.000	-	-	7 Dokumen	600.000.000
								2	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000
								IKP.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		10%	0	10%	0	20%	0	40%	175.000.000	60%	250.000.000	60%	425.000.000
		5	05	02	2,03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	NA	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	425.000.000
		5	05	02	2,03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan Zona Bekasi Kreatif	NA	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	175.000.000	-	-	1 Dokumen	175.000.000
								2	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Memperkuat Struktur Ekonomi Kota Bekasi	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0
								3	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000
								IKP.3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi		10%	100.000.000	10%	200.000.000	20%	0	40%	0	60%	249.613.000	60%	549.613.000
								IKP.4	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat	1 Predikat	1 Predikat	300.000.000	1 Predikat	750.000.000	1 Predikat	449.999.900	1 Predikat	450.000.000	2 Predikat	329.408.800	2 Predikat	2.279.408.700
		5	05	02	2,04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah Event Inovasi dan Teknologi yang Dikembangkan	1 Event	1 Event	400.000.000	1 Event	950.000.000	1 Event	449.999.900	1 Event	450.000.000	1 Event	579.021.800		3.279.021.700
		5	05	02	2,04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan		Jumlah Dokumen Feasibility Study Rencana	NA	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000.000

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														
											2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
								di Bidang Teknologi dan Inovasi																	
								Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	249.613.000	1 Laporan	249.613.000		
				5	05	02	2,04	03	1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode	1 Event	1 Dokumen	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									2	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	2	Jumlah event lomba inovasi daerah	NA	-	-	1 event	750.000.000	1 event	449.999.900	1 event	450.000.000	-	-	3 Event	1.649.999.900
									3	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	329.408.800	1 Laporan	329.408.800		
3	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja									Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	NA	81,47	4.141.875.000	83,91	4.608.200.000	86,43	24.261.729.501	88,16	23.765.359.020	89,92	25.543.596.020	89,92	82.320.759.541		
	3.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja								IKS 1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	NA	81,47	4.141.875.000	83,91	4.608.200.000	86,43	24.261.729.501	88,16	23.765.359.020	89,92	25.543.596.020	89,92	82.320.759.541		
				x	xx	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	IKP.1	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	2.336.875.000	100%	3.253.000.000	100%	2.974.728.000	100%	3.175.062.020	100%	3.154.062.020		14.893.727.040
				x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	-	0	-	0	1 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	14.000.000	9 Dokumen	64.000.000

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (KS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											
											2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	30.000.000	
		x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Jumlah Laporan	1	-	-	-	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	-	-	3 Dokumen	30.000.000	
								2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.000.000	
		x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.336.875.000	100%	3.253.000.000	100%	2.959.728.000	100%	3.140.062.020	100%	3.140.062.020	100%	14.829.727.040	
		x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jumlah Saluran Internet yang tersedia	96 line	96 line	200.000.000	96 line	60.000.000	96 line	60.000.000	-	-	-	-	96 line	380.000.000	
								2 Jumlah telepon Internet yang tersedia	72 line	72 line		72 line		72 line		-	-	-	-	72 line		
								3 Jumlah rekening telepon, internet air dan listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	c	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	
		x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Jumlah tenaga administrasi perkantoran	36 orang	36 orang	2.136.875.000	36 orang	3.193.000.000	36 orang	2.899.728.000	-	-	-	-	36 orang	11.309.665.020	
								2 Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	-	-	38 orang	3.080.062.020	-	-			
								3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Laporan	3.080.062.020	4 Laporan	3.080.062.020	
								IKP.2 Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan		100%	30.000.000	100%	0	100%	19.712.163.000	100%	19.135.297.000	100%	21.254.534.000		60.131.994.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												
											2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
								capaian kinerja dan keuangan															
		x	xx	01	2.02		Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	30.000.000	100%	0	100%	19.712.163.000	100%	19.135.297.000	100%	21.254.534.000	100%	38.877.460.000		
		x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan Premi BPJS	80	-	-	-	-	80 orang	19.697.163.000	80 orang	19.125.297.000	-	-	-	-	80 orang (3 tahun)	38.822.460.000
								2 Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN	80	-	-	-	-	-	-	80 orang	-	-	-	-	-	-	-
								3 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 orang	21.249.534.000	-	-	-
		x	xx	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	1 Dokumen	15.000.000	-	-	1 Dokumen	15.000.000	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	3000000
		x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Jumlah Laporan	12	1 Dokumen	15.000.000	-	-	-	-	5 Dokumen	10.000.000	-	-	-	-	36 Dokumen	25.000.000
								2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Laporan	5.000.000	-	-	-	-
								<b>IKP.3 Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		100%	1.755.000.000	100%	1.355.200.000	100%	1.404.838.501	100%	1.255.000.000	100%	910.000.000				6.680.038.501
		x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.200.000.000	100%	905.200.000	100%	1.089.948.500	100%	880.000.000	100%	710.000.000	100%	4.735.148.500		
		x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Jumlah Alat Tulis Kantor	4.581 unit, buah, box, set, rol, rim, pak	4.581 unit, buah, box, set, rol, rim, pak	200.000.000	4.581 unit, buah, box, set, rol, rim, pak	250.000.000	4139 unit	309.998.500	-	-	-	-	-	-	13.743	1.109.998.500

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												
											2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
								2	Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat dan Tamu	12 bulan	12 bulan	60.000.000	12 bulan	170.200.000	12 bulan	-	-	-	-	-	-	36 bulan	230.200.000
								3	Jumlah Bahan Logistik	-	-	-	-	-	-	-	7.976 unit	350.000.000	-	-	-	-	-
								4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 Paket	400.000.000	7 Paket	400.000.000	
		x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7.376 eksemplar, 340 mm	7.376 eksemplar, 340 mm	170.000.000	7.376 eksemplar, 340 mm	170.000.000	90m2	170.000.000	-	-	-	-	-	22.128	610.000.000
								2	Jumlah Cetak	-	-	-	-	-	-	-	4 unit	100.000.000	-	-	-	-	-
								3	Jumlah Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	183667 lembar	-	-	-	-	-	-
								4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Paket	50.000.000	2 Paket	50.000.000	
		x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 jenis	10 jenis	70.000.000	10 jenis	15.000.000	10 jenis	70.000.000	576 Buku/eksemplar	50.000.000	-	-	-	10 jenis	205.000.000
								2	Jumlah majalah yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								3	Jumlah surat kabar yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								4	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	
		x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Jumlah makanan dan minuman tamu	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								2	Jumlah kunjungan tamu	-	-	-	-	-	-	-	50 kunjungan	50.000.000	-	-	-	-	-
								3	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	
		x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	100%	5000 box	700.000.000	5000 box	300.000.000	200 kali	490.000.000	-	-	-	-	-	5000 box	1.790.000.000
								2	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536 orang	-
								3	Jumlah Frekuensi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Perjalanan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	500 Kali	300.000.000	-	-	-	-	-

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (KS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											
											2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
								4	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000
		x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Jumlah pengadaan box arsip	100%	-	-	-	-	295 box	49.950.000	-	-	-	-	600 box	79.950.000
								2	Jumlah arsip yang ditata/dikelola	-	-	-	-	-	-	-	1000 box	30.000.000	-	-		
		x	xx	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	-	-	100%	120.000.000	-	100%	20 Unit	130.000.000		-		-
		x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan	NA	-	-	11 Unit	120.000.000	-	-	20 unit	130.000.000	-	-	-	-
		x	xx	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	555.000.000	100%	330.000.000	100%	314.890.000	100%	245.000.000	100%	200.000.000	100%	1.644.890.000
		x	xx	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	19 unit kendaraan roda 2 dan 19 unit kendaraan roda 4	19 unit kendaraan roda 2 dan 19 unit kendaraan roda 4	240.000.000	19 unit kendaraan roda 2 dan 19 unit kendaraan roda 4	160.000.000	19 unit kendaraan roda 2 dan 19 unit kendaraan roda 4	0	7 unit	100.000.000	-	-	19 unit kendaraan roda 2 dan 19 unit kendaraan roda 4	500.000.000
							Kendaraan Dinas Jabatan	2	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	-	-	-	7 Unit	100.000.000	7 Unit	100.000.000	
		x	xx	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	19 unit kendaraan roda 2 dan 19 unit kendaraan roda 4	19 unit kendaraan roda 2 dan 19 unit kendaraan roda 4	240.000.000	19 unit kendaraan roda 2 dan 19 unit kendaraan roda 4	160.000.000	19 unit kendaraan roda 2 dan 19 unit kendaraan roda 4	20 unit	95.000.000	-	-	19 unit kendaraan roda 2 dan 19 unit kendaraan roda 4	735.000.000	
							Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	-	-	-	-	-	-	-	-	36 Unit	75.000.000	36 Unit	75.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (IKT), SASARAN (IKS), PROGRAM (IKP/OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												
											2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
									Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya														
		x	xx	01	2,09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah peralatan	65 unit PC, 59 unit printer	65 unit PC, 59 unit printer	75.000.000	65 unit PC, 59 unit printer	10.000.000	65 unit PC, 59 unit printer	74.890.000	99 Unit	50.000.000	-	-	65 unit PC, 59 unit printer	209.890.000	
								2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Unit	25.000.000	50 Unit	25.000.000	
								IKP.4	Optimalisasi Disiplin Aparatur	NA	100%	0	100%	0	100%	150.000.000	100%	0	100%	0	100%	150.000.000	
								IKP.5	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	20.000.000	100%	0	100%	20.000.000	100%	200.000.000	100%	225.000.000		465.000.000	
		x	xx	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	20.000.000	100%	0	100%	170.000.000	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	615.000.000	
		x	xx	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	NA	-	-	-	-	120 stel	150.000.000	-	-	-	-	360 stel	150.000.000	
								2	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	NA	-	-	-	-	120 stel	-	-	-	-	-	360 stel		
		x	xx	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	NA	13 orang	20.000.000	-	-	13 orang	20.000.000	-	-	-	-	39 orang	40.000.000	
								2	Jumlah Pegawai	NA	-	-	-	-	-	-	16 orang	50.000.000	-	-			
								3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA	-	-	-	-	-	-			34 Orang	225.000.000	34 Orang	225.000.000	
		x	xx	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan		Jumlah peserta	NA	-	-	-	-	-	-	80 orang	150.000.000	-	-		150.000.000	
TOTAL												9.953.798.400		11.007.606.930		33.564.799.931		30.114.294.020		32.020.192.820		116.660.692.101	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dirancang untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023.

Bappelitbangda mendukung pencapaian Misi I yaitu **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**. Tujuan dari Misi I adalah **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”**, dengan indikator **“Indeks Reformasi Birokrasi”**. Adapun Sasaran dari Tujuan Misi I tersebut yaitu **“Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah”** dengan indikator **“Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**.

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut, maka indikator kinerja Bappelitbangda adalah (1) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah; (2) Presentasi hasil kelitbangan yang dimanfaatkan; (3) Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapat predikat tingkat nasional; dan (4) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda. Indikator kinerja ini didasarkan pada aspek perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi aspek penting dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Kota Bekasi tersebut.

Dalam mencapai Indeks Reformasi Birokrasi, perencanaan merupakan bagian dalam 8 (delapan) area perubahan yaitu area penguatan akuntabilitas (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam penguatan implementasi SAKIP, pengintegrasian antara perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja akan membentuk sistem yang mengarah pada efisiensi penggunaan anggaran (*budget saving*). Perencanaan sebagai komponen Penilaian SAKIP memiliki bobot penilaian paling besar yaitu sebesar 30%, sedangkan Pengukuran Kinerja memiliki bobot 25%, Pelaporan Kinerja memiliki bobot nilai 15%, Evaluasi Kinerja memiliki bobot nilai 10%, dan Capaian Kinerja memiliki bobot nilai 20%.

Di samping itu, penelitian dan pengembangan menjadi aspek penting dalam menghasikan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tataran pelaksana kebijakan administrasi umum.

Berikut target indikator kinerja yang terkait Bappelitbangda Kota Bekasi tahun 2018-2023.

**Tabel 7.1.**

**Indikator Kinerja Bappelitbangda yang Mengacu pada RJMD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023**

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	64,36	66,05	70,01	72,40	74,65	75,75	75,75
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	63,49	66,28	70,05	73,25	75,00	77,00	77,00
3.	Persentase kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan	N/A	60%	70%	80%	90%	100%	100,00
4.	Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A	60%	70%	80%	90%	100%	100,00
5.	Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	N/A	60%	70%	80%	90%	100%	100,00
6.	Persentase kesesuaian antara capaian target pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama Bidang Infrastruktur dan	N/A	60%	70%	80%	90%	100%	100,00

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kewilayahan							
7.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	N/A	10%	10%	20%	40%	60%	60%
8.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	N/A	10%	10%	20%	40%	60%	60%
9.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi	N/A	10%	10%	20%	40%	60%	60%
10.	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapat predikat	N/A	1 Predikat	1 Predikat	1 Predikat	1 Predikat	2 Predikat	6 Predikat

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Kaidah Pelaksanaan Umum**

Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Sehubungan dengan implementasi Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut:

1. Bappelitbangda berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra Perubahan yang diselaraskan dengan dokumen perubahan RPJMD Kota Bekasi.
2. Bappelitbangda berkewajiban menyusun Renja Bappelitbangda Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Perubahan Bappelitbangda dan RKPD Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra Perubahan, Bappelitbangda Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik lima tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.
4. Meskipun pada prinsipnya dokumen Renstra Perubahan ini adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, namun dikarenakan juga memuat program dan kegiatan masa transisi I (satu) tahun, maka dalam pelaksanaannya berlaku selama 6 (enam) tahun.

## 8.2. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Bappelitbangda Kota Bekasi pada Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi seperti fungsional Perencana dan aparatur lainnya dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkualitas dengan sistem dan prosedur yang memadai, serta fungsional Peneliti dalam menyusun kajian atau penelitian dan mengembangkan inovasi/IPTEK yang berkualitas atau bermanfaat bagi Kota Bekasi;
2. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
3. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi.
4. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan bermanfaat.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun ke depan sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan.

**KEPALA BAPPELITBANGDA  
KOTA BEKASI**



**Drs. DINAR FAIZAL BADAR**  
Kepala Utama Muda/IV.c  
NIP. 19710115 199003 1 002

# **LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN**  
**PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Bekasi, Jawa Barat  
Telp/Fax. : (021) 89451761 Website: bappelitbangda.bekasikota.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN**  
**PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KOTA BEKASI**  
**NOMOR : 602.21/792-SK/Set**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI**  
**TAHUN 2018-2023**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappelitbangda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 602.21/981.a-BA.Renstra Tanggal 24 September 2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Mengkaji dan mereviu Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
2. Mempelajari visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2018-2023;
3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
4. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023; dan
6. Menyusun Renstra Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 2 Oktober 2020

KEPALA BAPPELITBANGDA  
KOTA BEKASI,



DR. DINAR FAIZAL BADAR

Tembusan Yth :

1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BAPPEDA KOTA BEKASI

NOMOR :

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018-2023

NO.	JABATAN DALAM TIM PENYUSUN	NAMA/JABATAN
I	Penanggungjawab	Kepala Bappelitbangda
II	Ketua	Sekretaris Bappelitbangda
III	Koordinator	Kepala Sub Bagian Perencanaan
IV	Anggota	1. Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan
		2. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
		3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		4. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
		5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
		6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		7. Kepala Sub Bagian Keuangan
		8. Kepala Sub Bidang Analisis Pembangunan Daerah
		9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah
		10. Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
		11. Kepala Sub Bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		12. Kepala Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		13. Kepala Sub Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
		14. Kepala Sub Bidang Penanaman Modal dan keuangan
		15. Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Pariwisata dan Kebudayaan
		16. Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian dan Pangan
		17. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan, Kearsipan
		18. Kepala Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Koperasi dan Usaha Mikro, pariwisata dan Kebudayaan Bidang Ekonomi dan SDA
		19. Kepala Sub Bidang Pemerintahan

NO.	JABATAN DALAM TIM PENYUSUN	NAMA/JABATAN
		20. Kepala Sub Bidang Bidang Sosial dan Pemerintahan; 21. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; 22. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi 23. Osvita Riani 24. Arief Fachturochman 25. Dewi Eka Setyaningsih 26. Dadan Rahmat Permana 27. Mahmud 28. Febrima Fajriana Chairin 29. Wulan Agustina Triwardani 30. Lisi Datrina 31. Narislah Sara 32. Aini Harisani 33. Wendrian Fadli
V	Sekretariat	1. Iis Susiowati 2. Acep Koswara

  
**KEPALA BAPPEDITBANGDA**  
**KOTA BEKASI,**  
**BAPPEDITBANGDA**  
**BEKASI**  
**Drs. DINAR FAIZAL BADAR**